

**KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMBERITAAN MEDIA
ISLAM: ANALISIS *FRAMING* SITUS BERITA ISLAM.LC.O TAHUN 2023-2024**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi
pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia**

Oleh

MUHAMMAD FAHRUR ROZI

21321207

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi

**KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMBERITAAN MEDIA
ISLAM: ANALISIS FRAMING SITUS BERITA ISLAMICO TAHUN 2023-2024**

Disusun oleh
MUHAMMAD FAHRUR ROZI
21321207

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Indonesia Tanggal : 18 Maret 2025

Dosen Pembimbing:

1. Pembimbing 1: Dr. Anang Hermawan, S.Sos, M.A
NIDN. 0506067702

()

2. Pembimbing 2: Dian Dwi Anisa, S.Pd., M.A.
NIDN. 0508019101

()

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMBERITAAN MEDIA
ISLAM: ANALISIS *FRAMING* SITUS BERITA ISLAMIL.CO TAHUN 2023-2024

Disusun oleh
MUHAMMAD FAHRUR ROZI
21321207

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Tanggal : 18 April 2025

Dewan Penguji:

1. Ketua: Dr. Anang Hermawan, S.Sos, M.A
NIDN. 0506067702

2. Anggota: Puji Rianto, S.IP.,MA
NIDN. 0503057601

3. Anggota: Dian Dwi Anisa, S.Pd., M.A.
NIDN. 0508019101

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Dr. Zaki Habibi., M.Comms
NIDN. 0517078101

Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fahrur Rozi
Tempat dan Tanggal Lahir : Nganjuk, 26 Maret 2002
Alamat : Jalan Barito 3 No. 37 Mangundikaran Nganjuk
NIM : 21321207
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Ilmu Komunikasi adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 6 Maret 2025



Muhammad Fahrur Rozi

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta kemudahan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMBERITAAN MEDIA ISLAM: ANALISIS *FRAMING* SITUS BERITA ISLAMI.CO TAHUN 2023-2024”. Selawat juga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi pedoman dalam segala tingkah laku. Skripsi ini disusun sebagai bentuk implementasi dari ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima dukungan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Iwan Awaluddin Yusuf, S.I.P., M.Si, Ph.D sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing akademik.
2. Bapak Anang Hermawan, S.I.P., M.Si. dan Ibu Dian Dwi Anisa, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh dosen dan staf akademik Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orang tua penulis, Nurul Hidayat dan Latifah Ismawati, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta materiil dalam setiap langkah perjalanan akademik penulis.
5. Saudara/I Muhammad Zakki Mubarak dan Najwa Nur Aini yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
6. Teman-teman asrama Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi teman berdiskusi, berbagi pengalaman, serta memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

7. Semua rekan di Jurusan Ilmu Komunikasi, Action Plus Indonesia, IISMA Frankfurt School, Kelas Pantau, Lakubudaya, Djogja Titenan, Kuliah Kerja Nyata Desa Gedongkiwo, Behind Studio, Marcomm Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Lembaga Pers Mahasiswa Himmah, Bangbeli, Jogja-NETPAC Asian Film Festival, Google Developer Students Club UII, UII Ayo Mengajar, Pilmapres serta rekan-rekan kompetisi yang saling menginspirasi dan memberikan dukungan baik dalam perkuliahan maupun proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.

Yogyakarta, 10 Maret 2025

Penulis,

Muhammad Fahrur Rozi

21321207

DAFTAR ISI

KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMBERITAAN MEDIA ISLAM: ANALISIS <i>FRAMING</i> SITUS BERITA ISLAM.LC.O TAHUN 2023-2024	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Landasan Teori	8
G. Metode Penelitian	14
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	19

A. Media <i>Online</i> Islami.co	19
B. Isu Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia.....	23
BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Temuan Analisis Artikel Berita Islami.co tentang Isu Keterwakilan Perempuan dalam Politik.....	27
B. Diskusi dan Pembahasan	65
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Keterbatasan Penelitian	72
C. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keterwakilan perempuan dalam politik dikonstruksi oleh media Islam, khususnya situs berita Islami.co, melalui pendekatan analisis *framing* model Robert N. Entman. Meskipun Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmatif berupa kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik, realitasnya keterlibatan perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk budaya patriarki, interpretasi agama yang bias gender, serta minimnya dukungan struktural dari partai politik. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis *framing* untuk menelaah 15 artikel yang diterbitkan oleh Islami.co selama tahun 2023-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mendefinisikan masalah (*define problems*), Islami.co menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia dan melihat akar masalahnya (*diagnose causes*) pada budaya patriarki yang kuat serta stereotipe bahwa politik adalah ranah laki-laki. Hal tersebut yang membatasi akses perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Media ini membuat penilaian moral (*make moral judgement*) bahwa diskriminasi gender dalam politik adalah ketidakadilan. Sebagai solusi (*treatment recommendation*), Islami.co mendorong pengarusutamaan gender dan perubahan sosial agar perempuan dapat berpartisipasi secara setara dalam politik dengan perspektif Islam.

Kata kunci: keterwakilan perempuan, politik, media Islam, analisis *framing*, Islami.co

ABSTRACT

This study aims to analyze how women's political representation is constructed by Islamic media, specifically the news site Islami.co, through Robert N. Entman's framing analysis approach. Although Indonesia has implemented an affirmative policy requiring a 30% quota for women's representation in politics, in reality, women's participation still faces various challenges, including patriarchal culture, gender-biased religious interpretations, and a lack of structural support from political parties. This study employs a qualitative method with framing analysis to examine 15 articles published by Islami.co during 2023-2024. The findings indicate that in defining the problem, Islami.co highlights the low representation of women in Indonesian politics and diagnoses the root causes as a strong patriarchal culture and the stereotype that politics is a male-dominated domain, which limits women's access to political participation. The media makes a moral judgment that gender discrimination in politics is unjust. As a treatment recommendation, Islami.co promotes gender mainstreaming and social change to enable equal political participation for women from an Islamic perspective.

Keywords: *women's representation, politics, Islamic media, framing analysis, Islami.co*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hingga saat ini, partisipasi perempuan dalam dunia politik di Indonesia masih belum mencapai tingkat yang optimal (dpr.go.id, 2022). Padahal, sejak tahun 2008, kebijakan afirmasi telah diterapkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen. Kebijakan ini menetapkan bahwa setiap daerah pemilihan harus memiliki minimal 30 persen calon perempuan. Selain itu, sistem *zipper* juga diterapkan, di mana dalam setiap tiga calon yang diajukan partai, setidaknya satu di antaranya harus perempuan.

Mengafirmasi pernyataan dari situs dpr.go.id, kebijakan tersebut memang belum memberikan dampak yang signifikan. Hingga tahun 2019, hanya sedikit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi yang mampu mencapai keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Bahkan, masih terdapat banyak daerah dengan persentase keterwakilan perempuan di bawah 20 persen. Di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), meskipun jumlah anggota perempuan mengalami peningkatan dari 44 kursi dari total 500 pada tahun 1999 menjadi 118 kursi dari 575 pada tahun 2019, proporsinya masih stagnan di kisaran 20 persen (Netgrit, 2023).

Selain minimnya partisipasi perempuan di parlemen, struktur politik di Indonesia masih didominasi oleh budaya patriarki. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik menjadi aspek krusial dalam upaya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam berbagai kebijakan publik (Hidir & Susanti, 2015). Oleh karena itu, penting untuk membahas bagaimana perempuan dapat memperoleh akses dan berperan aktif dalam ranah politik (Dedeas, 2016).

Isu keterwakilan perempuan dalam politik terus menjadi topik yang menarik dan relevan, terutama ketika dikaji dalam konteks gender yang mempengaruhi partisipasi perempuan di ranah politik. Pembahasan mengenai peran perempuan dalam politik juga sering menjadi sorotan dalam pemberitaan media massa, yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Sayangnya, masih banyak media yang cenderung

menampilkan liputan yang kurang mendukung, bahkan mendiskreditkan peran perempuan dalam politik (Rasyidin & Fidhia, 2016).

Seperti yang dikemukakan oleh Bostrom (dalam Ida & Subiakto, 2012), media sering kali mengajukan pertanyaan yang berbeda kepada politisi perempuan dibandingkan dengan politisi laki-laki. Selain itu, pemberitaan cenderung menyoroti aspek-aspek stereotipikal terkait perempuan, seperti penampilan fisik, peran sosial, hingga hal-hal yang tidak berhubungan dengan kapasitas mereka dalam politik, seperti gaya rambut dan kebiasaan berbelanja *online*. Hal ini menunjukkan bahwa media masih mempertahankan bias gender dalam peliputannya.



Gambar 1.1. Berita berjudul “Bupati Sleman Kustini Ramai Dimintai Netizen Cek Khodam” (<https://portaljogja.pikiran-rakyat.com/yogyaistimewa/pr-258247011/bupati-sleman-kustini-ramai-dimintai-netizen-cek-khodam?page=all> diakses pada 24 Desember 2024)

Kondisi ini membentuk narasi yang membatasi persepsi terhadap perempuan dalam politik dengan menitikberatkan perhatian pada aspek-aspek yang tidak relevan dengan kualitas kepemimpinan dan kapasitas politik mereka. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai peran serta kontribusi perempuan dalam politik dapat menjadi bias, bahkan menghambat partisipasi mereka. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam narasi media massa agar lebih mampu mencerminkan keragaman dan kontribusi perempuan secara objektif, serta mendorong representasi politik yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mempunyai berbagai perspektif untuk memandang perempuan di ranah publik ataupun politik, salah satunya yang disampaikan Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS (dalam Abi Aulia, 2017). Dia menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam tidak berarti dominasi perempuan atas laki-laki. Sebaliknya, itu terdiri dari kerja sama yang adil dan setara di mana kedua belah pihak dapat memanfaatkan kekuatan kepemimpinan mereka tanpa menganggap satu sama lain lebih unggul daripada satu sama lain. Seperti yang terlihat dalam sejarah Islam, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan harus aktif terlibat dalam politik dengan meningkatkan keterwakilan mereka, serta menjadi kekuatan moral untuk memberantas keburukan bangsa. Menjadi hal yang menarik kemudian apakah media massa Islam juga memiliki perspektif serupa atau justru kontra, yaitu tidak mendukung keterwakilan perempuan di ranah publik.

Dari uraian di atas, peneliti berminat untuk menganalisis bingkai berita yang dipublikasikan di media Islami.co menggambarkan partisipasi atau keterwakilan perempuan dalam politik. Peneliti memilih media Islam tersebut karena dianggap mewakili suara atau perspektif orang Islam, khususnya muslim urban, dalam memandang keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik. Hal tersebut bukan tanpa alasan, Islami.co diapresiasi sebagai media Islam terpopuler.

Sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh *Alvara Research Center* pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Islami.co adalah situs web Islam yang paling populer di kalangan muslim urban. Survei tersebut dilakukan di Jabodetabek dan Surabaya, dari 401 orang yang diwawancara secara langsung, 43,9% menyatakan bahwa Islami.co adalah situs web yang paling sering mereka kunjungi. Mayoritas pengunjung Islami.co adalah anak muda berusia 15 hingga 24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Islami.co berhasil menarik perhatian generasi muda dengan kontennya yang mudah diakses dan relevan (Choironi, 2024). Adapun hasil survei sebelumnya yang dilakukan pada 2019 juga menunjukkan hal yang sama (Ali, 2019).

Penelitian ini juga menawarkan diskusi tentang wacana gender yang berasal dari perspektif Islam, dibuktikan dengan media Islam yang menjadi subjek penelitian. Islami.co dipilih sebagai representasi media Islam karena memiliki rekam jejak sebagai

platform inklusif dalam menyajikan isu-isu keislaman. Media ini dikenal karena pendekatannya yang merangkul berbagai golongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pembingkai (*framing*) yang dilakukan oleh Situs Media Islam (Islami.co) Terkait Keterwakilan Perempuan dalam Politik?.

C. Tujuan Penelitian

Peneliti mengusulkan topik penelitian ini untuk:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan bingkai (*frame*) media Islami.co terkait isu keterwakilan perempuan dalam politik.
2. Memaparkan bagaimana media Islam merespon isu keterwakilan perempuan dalam politik.

D. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Aspek akademik: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian media serta menjadi referensi yang berguna bagi perkembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam pembahasan teori-teori yang berkaitan dengan pemberitaan media daring dan metode analisis *framing*.
2. Aspek sosial: Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana informasi di media dapat dimaknai secara dinamis. Hal ini berkaitan dengan adanya pengaruh ideologi atau opini yang dikonstruksi oleh media dalam membentuk persepsi publik.
3. Aspek praktis: Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses pembingkai berita dilakukan oleh media dalam melaporkan suatu peristiwa atau fenomena. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat

menjadi panduan bagi media dalam menyusun pemberitaan yang lebih mendukung representasi perempuan dalam politik.

E. Tinjauan Pustaka

Buku *Women Politicians and the Media* (2014) karya Maria Braden, seorang akademisi yang dikenal atas penelitian di bidang gender, komunikasi, dan politik, mengupas tuntas hubungan antara politisi perempuan dan media massa. Dalam bukunya, Braden menyoroti bagaimana media kerap memproduksi bias gender melalui liputan yang lebih berfokus pada penampilan, kehidupan pribadi, dan stereotip tradisional daripada kompetensi atau kebijakan yang diusung perempuan politisi. Analisis Braden, yang dilengkapi dengan studi kasus, menunjukkan bagaimana representasi semacam ini menghambat perempuan untuk diakui setara dengan rekan pria mereka dalam arena politik. Ia juga mengajukan rekomendasi agar media lebih adil dalam peliputan dengan mengutamakan isu substantif daripada aspek gender.

Jurnal penelitian yang relevan dengan topik ini adalah studi yang dilakukan oleh Endang Tri Santi, berjudul “Representasi Citra Politisi Perempuan Di Parlemen (Analisis *Framing* Dalam Pemberitaan Voaindonesia.Com Dan Mediaindonesia.Com)”. Penelitian ini didasarkan pada urgensi peran perempuan dalam parlemen serta bertujuan untuk menganalisis bagaimana media menggambarkan citra politisi perempuan. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini mengkaji pemberitaan dari Voa Indonesia dan Media Indonesia terkait representasi perempuan dalam dunia politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politisi perempuan di parlemen masih menghadapi ketidakpercayaan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan gender, terbatasnya akses, serta stereotip negatif yang menganggap mereka kurang konsisten, minim pengalaman, dan kurang memiliki strategi politik yang kuat (Santi, 2020). Ada kesamaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan peneliti, yaitu metode analisis yang menggunakan analisis *framing* dan topik gender. Adapun perbedaannya ada pada subjek dan objek penelitian.

Studi lain yang relevan berjudul “Politisi Perempuan Dalam Bingkai Media (Analisis *Framing* Robert Entman Atas Pemberitaan Politisi Perempuan Di Media Cetak)” yang dilakukan oleh Amalia Djuwita. Penelitian ini berangkat dari tingginya

sorotan media cetak terhadap kasus korupsi yang melibatkan politisi perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya bias gender dalam pemberitaan, di mana kasus korupsi yang melibatkan perempuan politisi cenderung dibingkai secara berbeda dibandingkan dengan kasus serupa yang melibatkan politisi laki-laki (Djuwita, 2016). Ada beberapa kesamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan peneliti ini, seperti metode analisis yang menggunakan analisis *framing* dan topik gender. Perbedaannya adalah subjek dan objek penelitian.

Penelitian lain yang berjudul "Pahlawan Devisa dalam Perspektif Media" dilakukan oleh Billy Sarwono. Studi ini berangkat dari maraknya kasus kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang terus menjadi perhatian publik. Penelitian ini menganalisis bagaimana media membingkai kasus Ruyati, seorang TKW, melalui sudut pandang narasumber perempuan. Dengan menggunakan metode analisis *framing* dari Entman, studi ini mengumpulkan data dari pemberitaan di harian Kompas, Media Indonesia, dan Republika. Hasil penelitian mengungkap beberapa temuan utama. Pertama, terdapat kecenderungan media menampilkan respons pesimistis terhadap kinerja pemerintah dalam menangani isu TKI. Kedua, jumlah narasumber perempuan dalam pemberitaan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Ketiga, narasumber laki-laki cenderung menyoroti aspek kebijakan politik, hukum, dan ekonomi terkait TKW, sementara narasumber perempuan lebih banyak berfokus pada diplomasi tingkat tinggi dalam menyelamatkan individu TKW (Sarwono, 2020). Ada beberapa kesamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan peneliti ini, seperti metode analisis yang menggunakan analisis *framing* dan topik gender. Perbedaannya adalah subjek dan objek penelitian.

Penelitian lainnya berjudul "Citra Caleg Perempuan Dalam 'Framing' Media Online", dilakukan oleh Edo Isra Exmanda. Berawal dari liputan pemberitaan pemilu yang menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi keterbatasan akses dalam dunia politik. Penelitian ini menganalisis bagaimana media daring *Kompas.com* dan *Detik.com* membingkai citra perempuan dalam pemberitaan calon legislatif perempuan pada Pemilu 2014, dengan menerapkan metode analisis *framing* yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Hasil penelitian mengungkap, kedua media tersebut sama-sama menyoroti isu terkait caleg perempuan yang dicalonkan karena paksaan, dengan fokus

pada tokoh populer. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa di dalam berita terdapat pertimbangan etika yang berlandaskan pada aspek ekonomi, politik, praktis, dan estetika. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dapat memperoleh jabatan politik jika mereka memenuhi kriteria tertentu, seperti tingkat pengetahuan dan pendidikan, latar belakang spiritual, aspek ekonomi, dan peran mereka di ranah politik secara umum (Exmanda, 2023). Ada beberapa kesamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan peneliti ini, seperti metode analisis yang menggunakan analisis *framing* dan topik gender. Perbedaan adalah subjek dan objek penelitian.

Penelitian lainnya berjudul “Konstruksi Media Dalam Memberitakan Politisi Perempuan Yang Terlibat Korupsi (Analisis *Framing* Kritis Pemberitaan Harian Umum Kompas Terhadap Kasus Korupsi Angelina Sondakh)”, dilakukan oleh Dila Novita. Penelitian ini bermula dari kasus korupsi yang melibatkan politikus wanita Angelina Sondakh yang mendapat perhatian luas dari media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kompas sebagai surat kabar umum mengaku netral dalam pemberitaannya, namun *framing* yang digunakan masih menunjukkan kecenderungan tertentu. Berita yang disajikan belum sepenuhnya menitikberatkan pada sisi substantif kasus korupsi yang menjerat Angelina Sondakh selama proses persidangan (Novita, 2016). Ada beberapa kesamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan peneliti ini, seperti metode analisis yang menggunakan analisis *framing* dan topik gender. Perbedaannya adalah subjek dan objek penelitian.

Penelitian lain yang berjudul “Citra Caleg Perempuan dalam ‘*Framing*’ Media Daring” yang dilakukan oleh Yenni Yuniati dan Dedeh Fardiah, berawal dari fenomena dalam pemberitaan pemilu yang memperlihatkan terbatasnya akses perempuan terhadap ruang publik akibat minimnya representasi mereka di media. Penelitian ini menganalisis bagaimana Kompas.com dan Detik.com membingkai citra calon legislatif perempuan pada Pemilu 2014 dengan menggunakan metode analisis *framing* dari Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media tersebut cenderung menggambarkan kandidat perempuan sebagai figur yang berani maju dalam kontestasi politik, namun mayoritas berasal dari kalangan publik figur atau selebriti. Penelitian ini mengelompokkan berita terkait kandidat perempuan ke dalam tiga kategori utama, yaitu citra fisik, citra populer, dan citra konflik. Selain itu, keputusan moral yang muncul

dalam berita dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, politik, pragmatis, dan estetika. (Yuniati & Fardiah, 2017). Ada beberapa kesamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan peneliti ini, seperti metode analisis yang menggunakan analisis *framing* dan topik gender. Perbedaannya adalah subjek dan objek penelitian.

Penelitian-penelitian yang telah disebut sebelumnya mengkaji bagaimana media, mayoritas media arus utama, membingkai perempuan dalam politik serta bagaimana bias gender masih kuat dalam pemberitaan. Hasilnya, subjek yang diteliti banyak menyoroti aspek personal, stereotip gender, atau kasus kontroversial seperti korupsi, daripada kompetensi dan kebijakan yang diusung politisi perempuan. Selain itu, media sering menggambarkan politisi perempuan sebagai kurang berpengalaman atau sekadar figur populer tanpa kapasitas politik yang kuat. Adapun keunikan dari penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya terletak pada fokus terhadap bagaimana media Islam alternatif membingkai isu keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik.

F. Landasan Teori

1. Media dan Konstruksi Realitas

Berita ditulis sesuai fakta yang mengandung beberapa unsur nilai berita. Beberapa unsur nilai berita tersebut adalah: Penting (*significance*), besaran (*magnitude*), kebaruan (*timeliness*), kedekatan lokasi dan emosi (*proximity*), keterkenalan (*prominence*), dan kemanusiaan. Sebagai tambahan, menurut Mursito (2012), dalam penulisan berita, wartawan dianjurkan menggunakan model piramida terbalik, di mana informasi paling penting disajikan terlebih dahulu di bagian awal, sementara detail tambahan yang kurang esensial ditempatkan di bagian berikutnya. Struktur ini dimulai dengan judul, diikuti oleh lead, isi berita, dan diakhiri dengan penutup.

Sedikit menyimpang dari paragraf sebelumnya, realitas adalah hasil konstruksi sosial yang dibuat setiap orang. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam "*The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociology of Knowledge*" (dalam Bungin, 2006), konstruksi sosial terhadap realitas menggambarkan bagaimana individu, melalui interaksi dan tindakan sosial, secara berkelanjutan membentuk dan mengalami realitas secara bersama-sama. Realitas subjektif sendiri merupakan hasil pemahaman

seseorang terhadap suatu peristiwa, yang dipengaruhi oleh pengalaman serta interaksi mereka dengan fenomena tersebut. (Mursito, 2012).

Realitas tidak terjadi begitu saja, tetapi dibentuk dan diciptakan (Menurut Peter L. Burger dalam Bungin, 2006). Proses ini melibatkan interaksi sosial yang memungkinkan individu atau kelompok untuk menciptakan makna atas dunia di sekitar mereka. Menurut Eriyanto (2001), hasil konstruksi tersebut sebenarnya sama, tetapi setiap orang dapat memahaminya dengan cara berbeda tergantung konstruksinya. Perbedaan dalam pengalaman, budaya, atau perspektif seseorang akan membentuk interpretasi yang berbeda terhadap realitas yang sama, sehingga realitas menjadi bersifat subjektif sekaligus intersubjektif. Hal ini menekankan pentingnya memahami dinamika konstruksi sosial dalam analisis fenomena sosial.

Media massa secara sistematis menjadi penyaji realitas (Eriyanto, 2001). Hal tersebut karena media massa membuat berita dari semua peristiwa di dunia, membuatnya menjadi cerita, diskusi, atau wacana khusus. Media massa tidak hanya bertindak sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai agen konstruksi sosial yang menentukan bagaimana realitas diinterpretasikan dan diinternalisasi oleh audiensnya. Cara media mengolah informasi dapat memengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu yang disajikan, sehingga media memiliki peran strategis dalam membentuk opini dan pandangan sosial.

Hamad (2004) menjelaskan bahwa penggunaan bahasa dalam wacana tersebut dapat memengaruhi konstruksi realitas dan menghasilkan makna atau gambar tertentu. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium yang membentuk cara individu atau masyarakat memahami dan menginterpretasikan realitas.

Media menggambarkan realitas berdasarkan pandangan wartawan, bukan fakta (Eriyanto, 2001). Menurut Handarani (2012), realitas yang disajikan oleh media tidak selalu mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Setiap media memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan berita, yang dipengaruhi oleh sudut pandang serta perspektif mereka terhadap suatu peristiwa.

Dalam bukunya "*Understanding News*" (2013), John Hartley menjelaskan bahwa berita merupakan suatu narasi bermakna yang terdiri dari berbagai unsur bahasa. Selain itu, berita juga membentuk pemahaman pembaca mengenai realitas dan dianggap sebagai hasil konstruksi manusia (Handarani, 2012). Baik berita maupun peristiwa

berasal dari realitas, namun proses peliputan, seperti pemotretan dan pengambilan gambar, sudah melibatkan konstruksi sejak awal (Pareno & Djupri, 2005).

Media tidak sekadar melaporkan realitas, tetapi juga membentuknya melalui proses produksi berita. Realitas bersifat subjektif, bergantung pada bagaimana wartawan memahami dan menginterpretasikan suatu peristiwa. Menurut Eriyanto (2001), berita bukan hanya representasi dari kejadian nyata, tetapi juga hasil dari interaksi antara wartawan, sumber informasi, serta lingkungan sosial yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, wartawan memiliki peran dalam mengarahkan pemahaman pembaca terhadap suatu peristiwa, sementara ideologi sosial media massa tempat mereka bekerja juga turut memengaruhi cara berita dikonstruksi (Shoemaker, 2014).

Tuchman (dalam Severin, 2011), menyatakan bahwa berita bukan sekadar refleksi realitas, tetapi juga merupakan bentuk penciptaan realitas itu sendiri. Ia menekankan bahwa media berkontribusi dalam melegitimasi kelompok dan institusi dominan. Sementara itu, Hall (Eriyanto, 2002) berpendapat bahwa pemberitaan media sering kali meminggirkan kelompok yang kurang berkuasa, sekaligus memperkuat posisi kelompok dominan. Proses ini berlangsung secara kompleks dan sering kali tidak disadari oleh khalayak.

Produksi berita dalam media didasarkan pada pemahaman serta perspektif wartawan mengenai suatu kejadian. Ini yang dikenal sebagai konstruksi realitas media. Fakta yang disajikan dalam berita bukanlah cerminan peristiwa secara utuh, melainkan hasil seleksi wartawan yang bertujuan menarik perhatian audiens. Dalam praktiknya, media terkadang menyajikan berita dengan informasi yang kurang jelas demi meningkatkan daya tariknya di mata publik (Wazis, 2012).

Hal ini senada dengan yang ditulis Mursito (2012) bahwa wartawan membentuk fakta melalui pengamatan, analisis, dan investigasi. Objektivitas menjadi prinsip utama dalam menyusun berita, yang idealnya harus didasarkan pada fakta tanpa opini wartawan. Pada dasarnya, berita harus benar, lengkap, dan akurat.

Mursito (2012) menambahkan: menerima informasi dari media berarti memahami realitas yang telah dikonstruksi oleh media itu sendiri. Fakta mengalami penyaringan melalui standar jurnalistik, sehingga realitas yang awalnya bersifat empiris berubah menjadi simbolik. Dalam proses ini, hanya sebagian kecil dari peristiwa yang

benar-benar dipilih untuk diberitakan, berdasarkan nilai berita yang dianggap bermanfaat bagi publik. Akibatnya, tidak semua peristiwa yang terjadi dapat diwakili dalam pemberitaan media.

Filsafat neo-Kantian berpendapat bahwa realitas tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu dipengaruhi oleh pemahaman manusia. Meski begitu, media tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga standar jurnalistik dalam menyajikan berita dan tidak boleh secara sembarangan memanipulasi fakta atau menyebarkan informasi yang menyesatkan (Mursito, 2012).

2. Analisis *Framing* untuk Mengkaji Bingkai Berita

Sebagai dasar, penulis ingin mengutip karya tulis Robert Entman (1993) tentang konsep dasar *Framing*:

“Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described. Typically, frames diagnose, evaluate, and prescribe, a point explored most thoroughly”

Pemilihan dan penonjolan adalah komponen utama *framing*. Memilih elemen tertentu dari kenyataan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi adalah proses yang dikenal sebagai *framing*. Tujuan dari *framing* adalah untuk mendorong definisi masalah, interpretasi sebab-akibat, evaluasi moral, dan/atau rekomendasi solusi untuk masalah yang dijelaskan.

“Frames, then, define problems—determining what a causal agent is doing with what costs and benefits, usually measured in terms of common cultural values; diagnose causes—identifying the forces creating the problem; make moral judgments—evaluating causal agents and their effects; and suggest remedies—offering and justifying treatments for the problems and predicting their likely effects. A single sentence may perform more than one of these four framing functions, although many sentences in a text may perform none of them. Moreover, a frame in any particular text may not necessarily include all four functions.”

Frame, dengan demikian, mendefinisikan masalah: menentukan apa yang dilakukan agen penyebab dengan biaya dan manfaat tertentu, biasanya diukur berdasarkan nilai-nilai budaya yang umum. Kedua, mendiagnosis penyebab: mengidentifikasi kekuatan yang menciptakan masalah. Ketiga, memberikan penilaian moral: mengevaluasi agen penyebab dan dampaknya. Keempat, menyarankan solusi:

menawarkan dan membenarkan perawatan atau solusi terhadap masalah, sekaligus memprediksi dampaknya. Dalam suatu teks, sebuah kalimat bisa saja memenuhi lebih dari semua fungsi *framing* ini, walaupun banyak kalimat dalam teks mungkin tidak menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Selain itu, *frame* dalam teks tertentu tidak selalu mencakup keempat fungsi ini secara lengkap.

Pesan media diwujudkan dalam bentuk berita yang disusun oleh jurnalis saat melaporkan suatu peristiwa atau kejadian. Dalam proses ini, tidak semua peristiwa mendapatkan sorotan; ada yang dipilih untuk diberitakan, sementara yang lain diabaikan. Bahkan dalam satu peristiwa, hanya bagian tertentu yang ditonjolkan, sementara aspek lainnya mungkin tidak disampaikan. Demikian yang ditambahkan oleh Eriyanto (2002).

Analisis *framing* merupakan metode analisis teks media yang digunakan untuk memahami cara media membentuk dan mengemas realitas. Proses *framing* melibatkan konstruksi makna terhadap suatu peristiwa dengan cara tertentu, sehingga realitas yang ditampilkan dapat mencerminkan ideologi tertentu. Dengan kata lain, analisis *framing* bertujuan untuk mengungkap bagaimana media membentuk realitas serta nilai-nilai yang mendasari penyajian fakta (Rachmat, 2006).

Melalui analisis *framing*, dapat diketahui bagaimana jurnalis menentukan isu yang diberitakan dan bagaimana mereka menyusun berita. Proses ini mencakup pemilihan fakta, penonjolan isu, pemilihan narasumber, serta cara penyajian berita agar lebih menarik, bermakna, dan mudah diingat oleh pembaca. Media massa dalam hal ini berfungsi sebagai arena di mana berbagai pihak bersaing untuk mempengaruhi opini publik melalui *framing* informasi yang mereka sajikan (Sobur, 2001). Berita yang dikemas dengan cara tertentu diharapkan dapat membentuk cara khalayak dalam memahami suatu isu (Soyomukti, 2013).

Menurut Eriyanto (2002), analisis *framing* dalam berita terdiri dari dua elemen utama, yaitu pemaknaan terhadap peristiwa dan penyusunan fakta. Setiap jurnalis memiliki sudut pandang pribadi dalam melaporkan berita, sehingga mereka memiliki kebebasan dalam menentukan aspek mana yang akan diliput dan bagaimana penyajiannya. Bahkan dalam proses penulisan ulang berita, wartawan tetap memiliki kendali dalam menentukan sumber dan sudut pandang yang digunakan.

Dalam penyajian berita, wartawan menyusun fakta berdasarkan sudut pandang yang ingin ditampilkan kepada khalayak. Kata-kata, kalimat, serta elemen visual seperti gambar dan tabel digunakan untuk menekankan aspek tertentu dalam berita. Fakta-fakta yang dipilih dapat dibuat lebih menonjol melalui pengulangan, penggunaan judul yang menarik, atau penempatan informasi di bagian utama berita. Oleh karena itu, peristiwa yang sama dapat dilaporkan dengan cara yang berbeda tergantung pada perspektif dan konstruksi wartawan dalam menyusun berita (Eriyanto, 2002).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, *framing* terdiri dari dua dimensi utama: pemilihan isu dan penekanan pada elemen tertentu dalam pemberitaan (Entman, 1993). Proses pemilihan isu melibatkan seleksi fakta dari berbagai realitas, di mana hanya aspek tertentu yang disajikan, sementara yang lain dikesampingkan. Wartawan menentukan bagian mana yang akan diangkat dan bagaimana cara menyampaikannya. Penggunaan bahasa, pemilihan kata, serta elemen visual seperti grafik dan gambar dapat digunakan untuk memperkuat *framing* suatu peristiwa. Misalnya, judul berita yang mencolok, pengulangan informasi tertentu, atau penggunaan infografis dapat membentuk cara pembaca memahami suatu isu (Rachmat, 2006).

Berikut empat pembagian komponen *framing* (Entman, 1993):

- a. *Define Problem* (Pendefinisian masalah): Menentukan bagaimana suatu peristiwa atau isu didefinisikan oleh media.
- b. *Diagnose Causes* (Memperkirakan sumber masalah): Menentukan faktor-faktor penyebab suatu masalah dan pihak yang dianggap bertanggung jawab.
- c. *Make Moral Judgement* (Membuat keputusan moral): Memberikan evaluasi moral terhadap peristiwa atau aktor yang terlibat, termasuk dalam hal legitimasi atau delegitimasi tindakan tertentu.
- d. *Treatment Recommendation* (Menekankan penyelesaian): Menawarkan penyelesaian atau tindakan yang dianggap tepat dalam menangani suatu isu.

Konsep *framing* ini menunjukkan bahwa cara wartawan memahami peristiwa akan mempengaruhi cara mereka menyusun berita. Perspektif yang digunakan dalam *framing* dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda terhadap suatu peristiwa. Dalam *Diagnose Causes*, wartawan mengidentifikasi faktor yang dianggap sebagai penyebab

utama dari suatu masalah. Menurut Eriyanto (2002), perbedaan dalam memahami masalah juga akan mempengaruhi siapa yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. *Make Moral Judgement* berperan dalam membangun pembenaran atas pendefinisian masalah, dengan menggunakan bukti dan narasi tertentu. Sementara itu, rekomendasi solusi dalam *Treatment Recommendation* sangat bergantung pada sudut pandang wartawan serta bagaimana mereka menginterpretasikan akar permasalahan (Eriyanto, 2002).

G. Metode Penelitian

1. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif eksplanatif untuk menganalisis pemberitaan terkait keterwakilan perempuan dalam politik. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk teks yang kemudian diolah dan ditafsirkan menjadi narasi yang sistematis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai teks yang ditulis oleh subjek penelitian (Bungin, 2007).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, yang berpandangan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial. Oleh karena itu, menurut Eriyanto (2002), analisis dalam paradigma konstruktivisme berfokus pada bagaimana suatu peristiwa atau realitas dikonstruksi serta metode yang digunakan dalam pembentukan konstruksi tersebut.

Paradigma konstruktivisme dianggap relevan dalam menganalisis teks berita karena, menurut perspektif konstruksi sosial, berita bukan sekadar refleksi dari peristiwa nyata, melainkan hasil interaksi antara fakta dan interpretasi wartawan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana media membingkai isu keterwakilan perempuan dalam politik serta sejauh mana peran jurnalis dalam membentuk konstruksi atas isu tersebut.

2. Rancangan Penelitian

Mengacu pada Sugiyono (2016), penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan untuk menentukan objek berita yang paling sesuai dengan tujuan dan tema

penelitian. Oleh karena itu, hanya berita yang relevan dengan fokus penelitian yang akan dianalisis, sementara berita yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikecualikan dari penelitian.

Subjek penelitian merujuk pada entitas yang dikaji oleh peneliti (Arikunto, 2010). Dalam konteks ini, unit analisis yang digunakan adalah teks berita sebagai sumber utama penelitian. Penelitian ini berfokus pada pemberitaan yang diterbitkan oleh media daring Islami.co, yang dipilih sebagai representasi media Islam karena memiliki rekam jejak sebagai *platform* yang inklusif dan ramah terhadap berbagai kelompok. Berita yang dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan isu keterwakilan perempuan dalam politik, dengan cakupan periode tahun 2023 dan 2024. Kedua tahun ini dipilih karena merupakan periode politik penting di Indonesia, di mana berlangsung dua agenda besar demokrasi, yakni pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) (Subchan Zuhri, 2021).

Pada periode tersebut, berita mengenai politik menjadi topik yang banyak dibicarakan di media dan masyarakat. Islami.co secara aktif juga menerbitkan pemberitaan mengenai perempuan dalam politik selama periode 2023 dan 2024. Penulis mendapatkan data tersebut dengan cara mengetik kata kunci “Perempuan Politik” di kolom pencarian pada *website* Islami.co. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 15 artikel yang sesuai dengan konteks politik praktis untuk dianalisis. Berikut adalah artikel yang diteliti:

Tabel 1.1. Artikel tentang Isu Keterwakilan Perempuan dalam Politik yang Diterbitkan Islami.co selama 2023-2024

No	Tanggal	Judul
1.	16 Maret 2023	Khayzuran, Perempuan Berpengaruh di Masa Kejayaan Dinasti Abbasiyah (Tokoh) https://islami.co/khayzuran-perempuan-berpengaruh-di-masa-kejayaan-dinasti-abbasiyah/
2.	12 Mei 2023	Membicarakan Pemimpin Perempuan di Politik Lokal Desa Saya (Feature) https://islami.co/membicarakan-pemimpin-perempuan-di-politik-lokal-desa-saya/
3.	15 Mei 2023	Kesetaraan Gender, Islam dan Kepemimpinan Perempuan di Jawa (Tela’ah)

		https://islami.co/kesetaraan-gender-islam-dan-kepemimpinan-perempuan-di-jawa/
4.	31 Mei 2023	Agensi Politik Perempuan dalam Budaya Populer (Kolom) https://islami.co/agensi-politik-perempuan-dalam-budaya-populer/
5.	16 September 2023	Perempuan Memimpin: Tokoh-tokoh Perempuan yang Layak Didukung saat Pemilu 2024 (Kolom) https://islami.co/perempuan-memimpin-tokoh-tokoh-perempuan-yang-layak-didukung-saat-pemilu-2024/
6.	18 September 2023	Pemilu 2024: Memberi Kesempatan Para Perempuan untuk Memimpin (Kolom) https://islami.co/pemilu-2024-memberi-kesempatan-para-perempuan-untuk-memimpin/
7.	10 November 2023	Ternyata, Mayoritas Parpol Tidak Penuhi Minimal 30% Caleg Perempuan, Suara Perempuan Dipinggirkan? (Berita) https://islami.co/ternyata-mayoritas-parpol-tidak-penuhi-minimal-30-caleg-perempuan-suara-perempuan-dipinggirkan/
8.	31 Agustus 2024	Tidak Boleh Lagi Diremehkan, Ini Sejumlah Bukti Kepemimpinan Perempuan dan Berhasil (Feature) https://islami.co/tidak-boleh-lagi-diremehkan-ini-sejumlah-bukti-kepemimpinan-perempuan-dan-berhasil/
9.	16 Oktober 2024	Bagaimana Narasi Perempuan Politik Dikisahkan dalam Sejarah Islam dan Efeknya Hari Ini. https://islami.co/bagaimana-narasi-perempuan-politik/
10.	18 Oktober 2024	Politik Misoginis dan Seksis Mewarnai Pilkada 2024, Mau Maju kok Pikirannya Mundur Gitu (Kolom) https://islami.co/politik-misoginis-dan-seksis-mewarnai-pilkada-2024-mau-maju-kok-pikirannya-mundur-gitu/
11.	28 Oktober 2024	Tidak Lebih dari 15 Person Jadi Menteri, Komitmen Pemerintah soal Isu Perempuan Dinilai Kurang (Berita) https://islami.co/tidak-lebih-dari-15-persen-jadi-menteri-komitmen-pemerintah-soal-isu-perempuan-dinilai-kurang/
12.	28 Oktober 2024	Isu Kepemimpinan Perempuan dalam Politik Kini Dinilai Lebih Mundur, Sejarah Islam Lebih Kaya (Kilas) https://islami.co/isu-kepemimpinan-perempuan-dalam-politik-kini-dinilai-lebih-mundur-sejarah-islam-lebih-kaya/

13.	28 Oktober 2024	Kepemimpinan Politik Perempuan Rendah, Rumah KitaB Tawarkan Wacana Alternatif agar Agama Jadi Inspirasi Kesetaraan (Berita) https://islami.co/kepemimpinan-politik-perempuan-rendah-rumah-kitab-tawarkan-wacana-alternatif-agar-jadi-inspirasi-kesetaraan/
14.	29 Oktober 2024	Objektifikasi Perempuan dalam Politik yang Semakin ke Sini Semakin ke Sana (Pakar) https://islami.co/objektifikasi-perempuan-dalam-politik-yang-semakin-ke-sini-semakin-ke-sana/
15.	30 Oktober 2024	Emang Salah ya Perempuan Ambisius di Politik? Cerita Stigma dan Seksisme di Gedung Parlemen (Feature) https://islami.co/emang-salah-ya-perempuan-ambisius-di-politik-cerita-stigma-dan-seksisme-di-gedung-parlemen/

Penelitian ini diawali dengan pemilihan tema, di mana artikel-artikel yang akan dianalisis dikelompokkan berdasarkan kesesuaian dengan tema tersebut. Setelah itu, dilakukan pembatasan cakupan artikel dalam rentang waktu tertentu, yakni tahun politik 2023 dan 2024. Untuk menganalisis artikel yang diambil dari Islami.co, penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* dengan model yang dikembangkan oleh Robert N. Entman.

Menurut Sobur (2001), analisis *framing* digunakan untuk mengungkap ideologi atau cara media dalam membentuk dan mengemas realitas. Metode ini membantu audiens memahami perspektif yang digunakan wartawan dalam memilih serta menyajikan suatu isu dalam pemberitaan. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah bagaimana media mengonstruksi dan membingkai isu keterwakilan perempuan dalam politik. Proses seleksi isu serta penekanan terhadap elemen tertentu dalam pemberitaan dianalisis menggunakan model *framing* Robert N. Entman. Model ini dipilih karena mampu menggambarkan secara luas bagaimana suatu peristiwa dipahami dan ditampilkan oleh wartawan. Eriyanto (2002), menjelaskan bahwa *framing* melibatkan proses penonjolan informasi agar lebih menarik, bermakna, serta mudah diingat oleh pembaca.

Dalam menganalisis berita-berita tersebut, peneliti menerapkan empat elemen *framing* menurut Robert N. Entman. Pertama, *define problems* (pendefinisian masalah), yang berfokus pada bagaimana media menginterpretasikan suatu peristiwa atau isu.

Kedua, *diagnose causes* (identifikasi penyebab), yang bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang dianggap sebagai penyebab utama dari suatu permasalahan. Ketiga, *make moral judgement* (penilaian moral), yang menyoroti nilai-nilai moral yang digunakan dalam pemberitaan untuk melegitimasi atau mendelegitimasi tindakan tertentu. Keempat, *treatment recommendation* (rekomendasi solusi), yang menganalisis solusi atau langkah-langkah yang ditawarkan media dalam menanggapi isu tersebut (Entman, 1993).

Setelah analisis dilakukan, hasil penelitian ini dibandingkan dengan teori yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara bersama pihak redaksi Islami.co guna mendapatkan tambahan perspektif.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Media Online Islami.co

1. Gambaran Umum Perusahaan Media Islami.co

Subjek pada penelitian ini adalah Islami.co. Islami.co adalah sebuah media *online* yang menyebarkan informasi, gagasan, dan narasi tentang Islam yang ramah, inklusif, dan damai (Redaksi Islami.co, 2013). Media tersebut mengusung *tagline* “Media Islam Ramah dan Mencerahkan”. Didirikan pada tanggal 1 Agustus 2013 oleh anak-anak muda lulusan pesantren, terutama Mohamad Syafi’ Ali, Islami.co memiliki misi untuk melawan hegemoni situs-situs provokatif yang kerap menyebarkan kebencian dan sentimen negatif di ruang digital. Syafi’ Ali menulis bahwa media provokatif tersebut jauh dari nilai-nilai Islam dan akhlaq mulia sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, juga membahayakan ukhuwah, baik di kalangan sesama muslim maupun bangsa Indonesia. Islam bagi Syafi’ Ali adalah agama yang menekankan pentingnya akhlaq mulia, rahmat bagi semesta, bukan agama yang ingin memonopoli kebenaran dan ruang-ruang di surga (Mohamad Syafi’ Ali, 2013).

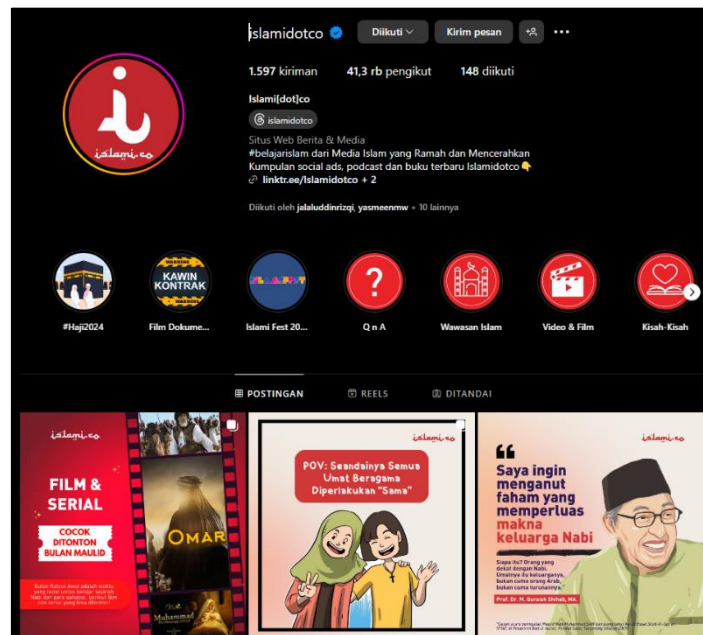


Gambar 2.1. Logo Islami.co
Sumber: laman resmi Islami.co (2024)

Dalam sebuah wawancara eksklusif di kantor Islami.co antara penulis dan redaktur Islami.co, Anwar Kurniawan (2023) mengatakan bahwa sebagai sebuah platform digital, Islami.co menyadari pentingnya media sosial dan internet sebagai sarana utama bagi masyarakat, khususnya kalangan Muslim urban dan masyarakat digital, untuk mengakses informasi dan pengetahuan agama. Hal ini menjadikan Islami.co berupaya menempatkan diri sebagai sumber informasi yang kredibel, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan audiensnya, terutama mereka yang mungkin tidak memiliki akses mudah terhadap pendidikan agama secara konvensional.



Gambar 2.2. Halaman Muka Website Islami.co (<https://islami.co/> diakses pada 1 Oktober 2024)



Gambar 2.3. Laman Instagram Islami.co (<https://www.instagram.com/islamidotco/> diakses pada 1 Oktober 2024)

Dalam gambar 2.2 di atas, kolom kategori terletak di bagian depan situs web Islami.co untuk membantu pengguna menemukan artikel yang menarik untuk dibaca. Logo Islami.co juga terlihat jelas di bagian atas halaman utama situs web. Pembaca bisa memilih kolom kategori: artikel populer, artikel terbaru, artikel rekomendasi, artikel haji 2024, dan lainnya. Berita rekomendasi berada di bawah kolom kategori, sesuai dengan berita terkini dan mudah diakses oleh pembaca. Selain itu, Islami.co juga memiliki akun

media sosial Instagram yang aktif untuk menjangkau lebih kalangan muda dengan konten yang menarik, menyesuaikan tren terkini.

Secara kelembagaan, Islami.co adalah bagian dari PT Islami Digital Indonesia dan tidak hanya mendistribusikan artikel keislaman *online* tetapi juga melakukan berbagai aktivitas, seperti pelatihan, kampanye sosial dengan konten audio visual, Islamifest, dan penulisan buku. Lembaga tersebut aktif berkolaborasi dengan berbagai lembaga lain, baik media maupun organisasi nirlaba, yang memiliki visi serupa. Kerjasama ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga untuk memperkuat jaringan komunitas yang mendukung narasi Islam yang ramah dan inklusif. Dengan berbagai aktivitas tersebut, Islami.co terus memperluas jangkauannya di kalangan masyarakat digital dan Muslim urban, untuk menyebarkan pesan-pesan Islam yang damai secara efektif dan luas (Anwar Kurniawan, 2023).

Salah satu acara besar hasil kolaborasi yang diadakan Islami.co adalah Islamifest. Dikutip dari websiter resminya, Islamifest adalah Ruang perjumpaan tahunan yang dirancang untuk merayakan keberagaman dan keindahan budaya Islam Indonesia. Islamifest menghadirkan berbagai elemen seni, budaya, dan kajian keislaman abad ke-21 dengan para artis, komika, musisi, tokoh nasional, pakar, dan pendakwah terkurasi yang akan meningkatkan pengalaman keberislaman dan kebhinekaan siapa pun yang hadir (Islamifest, 2023).



Gambar 2.4. Islami Fest 2023 (<https://islami.co/kata-mereka-soal-islami-fest-saya-nonmuslim-pertama-ikut-festival-keislaman-ternyata-fun-dan-universal/> diakses pada 16 Oktober 2024)

Seperti yang telah ditulis di bab pertama, Islami.co adalah situs web Islam yang paling populer di kalangan muslim urban, berdasarkan hasil survey *Alvara Research Center*. Mayoritas pengunjung Islami.co adalah anak muda berusia 15 hingga 24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Islami.co berhasil menarik perhatian generasi muda dengan kontennya yang mudah diakses dan relevan (Choironi, 2024). Adapun hasil survei sebelumnya yang dilakukan pada 2019 juga menunjukkan hal yang sama (Ali, 2019).

2. Islami.co dalam Kampanye Emansipasi Perempuan

Islami.co memiliki beberapa reputasi dalam kampanye emansipasi perempuan. Salah satunya pada 25 Oktober 2024 lalu. Media tersebut berkolaborasi dengan Rumah kitaB, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan hak-hak kaum marginal akibat pandangan sosial keagamaan yang diskriminatif, untuk mengadakan diskusi buku “Fikih Kepemimpinan Politik Perempuan”. Acara ini membahas interpretasi teks-teks Islam klasik dan modern, mengangkat berbagai argumen tentang kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dari perspektif fikih. Fokus utamanya adalah mengintegrasikan perempuan secara lebih inklusif dalam politik demi menciptakan sistem pemerintahan yang representatif dan adil.



Gambar 2.5. Diskusi Buku Fikih Kepemimpinan Politik Perempuan
(<https://www.youtube.com/watch?v=FRmTID7Mz3o> diakses pada 25 Oktober 2024)

3. Struktur Organisasi Islami.co

Diambil dari *website* Islami.co, struktur organisasi media tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, mencakup:

- a. *Founder*: Savic Ali & Saeful Uyun
- b. *Chief Executice Officer*: Savic Ali
- c. *Chief Operating Officer*: Elik Ragil
- d. *Writers & Editors*: Alvin Nur Choironi, Hengki Ferdiansyah, Dedik Priyanto, Rifqi Fairuz
- e. *Contributors* : M. Naufal Hisyam (Jakarta) Miftahuzzakiyah (Lampung) Fera Rahmatun Nazila, Zakky Zulhazmi (Solo), Supriansyah (Banjarmasin), Sarjoko Wahid (Yogyakarta), Ustadz Ahong, Dr. Muhammad Ibnu, Alhafiz Kurniawan
- f. *Video Editors*: Saeful Uyun & Elik Ragil
- g. *IT*: Roni Lantip, Fahmi, Rosyid
- h. *Finance Officer*: Hexa Rahmawati

4. Alamat Kantor Media

Kantor redaksi Islami.co berada di Ruko CO/SB 03, Apartemen Citylight, Jl. Ir. H. Juanda, No. 38, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412.
Email: redaksi@islami.co

B. Isu Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia

Objek pada penelitian ini adalah teks-teks artikel berita tentang isu keterwakilan perempuan dalam politik, yang diterbitkan di media *online* Islami.co. Sebagai penjabaran, dalam konteks politik Indonesia, kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan sudah dimulai sejak lama, misalnya dengan pembentukan Menteri Urusan Peranan Wanita pada tahun 1978, yang kini dikenal sebagai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA, 2020). Selain itu, sejak reformasi, kuota 30% untuk perempuan dalam pemilihan legislatif telah diatur dalam undang-undang, seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 dan ditegaskan kembali dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, yang mengharuskan kuota tersebut dipenuhi di setiap daerah pemilihan (Perludem, 2024). Namun, realisasi keterwakilan ini masih belum optimal. Misalnya, meskipun ada peningkatan keterwakilan perempuan

dari 11,24% pada tahun 2004 menjadi 21,39% pada tahun 2021, angka tersebut masih jauh dari target 30% (KemenPPA, 2023).

Pada pemilu 2024, keterwakilan perempuan mencapai 22%, setara dengan 128 anggota legislatif perempuan terpilih (Basyari, 2024). Meskipun demikian, pencapaian ini masih belum memenuhi harapan karena berbagai tantangan struktural yang terus dihadapi oleh perempuan dalam politik, seperti politik uang, kurangnya dukungan partai, dan minimnya penempatan di posisi strategis dalam daftar calon legislatif.

Karina Utami Dewi (2024) mencatat beberapa kendala utama dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan. Salah satunya adalah bahwa partai politik sering kali mencalonkan perempuan bukan karena mereka ingin memperjuangkan isu gender, melainkan karena popularitas atau koneksi mereka dengan tokoh-tokoh penting. Misalnya, pada pemilu 2024, beberapa tokoh perempuan seperti Putri Zulkifli Hasan dan Atalia Praratya terpilih karena hubungan mereka dengan tokoh politik terkemuka (Basyari, 2024). Fenomena ini juga terlihat di provinsi Bengkulu, di mana dua dari empat caleg perempuan terpilih memiliki koneksi dengan pejabat tinggi (Fatwa, 2024).

Selain itu, meskipun semakin banyak perempuan yang terpilih ke dalam DPR, tidak semua dari mereka memprioritaskan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan. Sebagai contoh, meski ada perempuan di DPR, pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) memakan waktu hingga 10 tahun sejak diusulkan pertama kali pada 2012 hingga akhirnya disahkan pada 2022 (BBC News Indonesia, 2022).

Selanjutnya, kendala lain dari keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia adalah realita budaya patriarki yang berperan besar dalam menghambat partisipasi perempuan. Seperti dijelaskan oleh Fredik Lambertus Kollo, patriarki menempatkan laki-laki pada posisi tertinggi di masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan politik, yang menyebabkan perempuan sering merasa kurang diperhatikan dan kurang percaya diri untuk terlibat dalam dunia politik (Kollo, 2017). Anggapan bahwa politik adalah ranah maskulin, sebagaimana dikemukakan oleh Nimrah dan Sakaria (2015), menyebabkan perempuan identik dengan sektor domestik, yang berdampak pada rendahnya partisipasi politik perempuan.

Selain faktor budaya, media massa turut membentuk persepsi masyarakat tentang keterlibatan perempuan dalam politik. Media sering kali menggambarkan perempuan sebagai sosok yang lebih lemah dan tidak mandiri, memperkuat stereotip patriarki yang ada. Nurcahyo (2016) berpendapat bahwa konstruksi media ini semakin memperkuat gagasan patriarki dengan mengedepankan laki-laki sebagai aktor utama dalam dunia politik. Dampak dari representasi media ini adalah keterlibatan perempuan dalam politik tetap rendah, karena mereka dianggap kurang kompeten atau tidak sesuai dengan peran politik yang maskulin.

Untuk mengatasi hambatan ini, salah satu solusinya adalah memperkuat partisipasi politik perempuan dengan memberikan lebih banyak kesempatan dan peran yang sama dalam struktur partai politik (Hidir & Susanti, 2015). Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan perempuan bisa diakomodasi dalam kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Maka dari itu, sebagai pembentuk opini publik, penting bagi media massa untuk mendukung atau bahkan berpihak pada keterwakilan perempuan dalam politik.

Sebagai pedoman, menurut model keterwakilan perempuan yang terintegrasi oleh Schwindt-Bayer (2010), berikut empat dimensi yang harus dipenuhi untuk mencapai keterwakilan perempuan yang komprehensif:

1. Keterwakilan Formal: Terkait dengan aturan yang mengatur proses representasi, seperti kuota gender. Di Indonesia, dimensi ini sudah tercapai dengan adanya undang-undang kuota 30% untuk perempuan.
2. Keterwakilan Deskriptif: Ini adalah representasi perempuan secara nyata di parlemen. Meskipun jumlah perempuan di parlemen Indonesia meningkat, tetap belum mencapai angka 30% yang diharapkan.
3. Keterwakilan Substantif: Mengacu pada perempuan yang terpilih membawa isu-isu baru, seperti kesetaraan gender. Namun, perempuan di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan struktural, termasuk lingkungan politik yang didominasi laki-laki, yang membuat mereka sulit untuk mengangkat isu-isu yang progresif.
4. Keterwakilan Simbolis: Berkaitan dengan dampak psikologis terhadap pemilih, di mana kehadiran perempuan dalam parlemen dapat meningkatkan kepercayaan publik pada sistem demokrasi. Indonesia belum mencapai dimensi ini secara penuh,

mengingat keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah, serta isu kesetaraan gender yang belum menjadi prioritas utama di parlemen.

Berikut adalah data dari *Global Gender Gap Report 2023*: Indonesia berada di peringkat ke-87 dari 146 negara dalam kesetaraan gender secara keseluruhan, dan peringkat ke-81 dalam pemberdayaan politik dengan tingkat paritas hanya 18,1%, jauh di bawah Islandia yang mencapai 90,1% (World Economic Forum, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai kesetaraan gender yang menyeluruh.

Meskipun kemajuan telah dicapai dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, tantangan seperti budaya politik patriarki, politik uang, serta kurangnya dukungan partai politik masih menghambat tercapainya kesetaraan gender yang utuh di Indonesia. Kesetaraan gender dalam politik akan sulit tercapai jika upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan berhenti hanya pada pemenuhan kuota formal, tanpa memberikan dukungan substantif dan strategis bagi perempuan untuk berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan.

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Studi ini melihat pembingkai berita yang dimuat Islami.co tentang isu keterwakilan perempuan dalam politik, yaitu sepanjang tahun 2023 dan 2024 yang merupakan tahun politik. Peneliti berusaha mempelajari bagaimana media membingkai berita dari berbagai perspektif, termasuk masalah yang diangkat, analisis penyebab masalah, penilaian masalah, dan, terakhir, penyelesaian masalah. Peneliti menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman.

Proses pemilihan berita oleh peneliti didasarkan pada tema dan kriteria berita untuk kemudian diteliti. Peneliti memilih 15 artikel dari situs web Islami.co untuk dijadikan subjek penelitian. Setiap artikel berita akan dibahas secara rinci sebagai berikut:

A. Temuan Analisis Artikel Berita Islami.co tentang Isu Keterwakilan Perempuan dalam Politik

1. Judul artikel: Khayzuran, Perempuan Berpengaruh di Masa Kejayaan Dinasti Abbasiyah (Tokoh)



Gambar 3.1. Artikel “Khayzuran, Perempuan Berpengaruh di Masa Kejayaan Dinasti Abbasiyah” pada tampilan website Islam.co (<https://islami.co/khayzuran-perempuan-berpengaruh-di-masa-kejayaan-dinasti-abbasiyah/> diakses pada 26 Oktober 2024)

Artikel yang ditulis oleh Hilmi Abedillah ini terbit di rubrik Tokoh Islami.co pada 16 Maret 2023. Artikel tersebut membahas sosok Khayzuran binti ‘Atha’, seorang perempuan yang memiliki peran penting dalam masa keemasan Dinasti Abbasiyah. Khayzuran, yang awalnya seorang hamba sahaya, menjadi istri Khalifah

Al-Mahdi dan ibu dari dua khalifah, Musa Al-Hadi dan Harun Ar-Rasyid. Berkat kecerdasan dan kepiawaiannya, Khayzuran tidak hanya berperan dalam urusan domestik, tetapi juga dalam kebijakan politik dan pemerintahan. Meskipun sering diabaikan dalam catatan resmi sejarah, pengaruhnya tampak jelas dalam berbagai aspek kekhalifahan, termasuk cetakan koin atas namanya dan keterlibatannya dalam keputusan kenegaraan. Artikel ini menyoroti pentingnya pengakuan terhadap peran perempuan dalam sejarah, khususnya dalam sejarah politik. Adapun hasil analisis artikel tersebut:

Define Problems. Islami.co menggambarkan bahwa banyak orang tidak tahu atau tidak mengakui peran penting perempuan dalam politik, contohnya dalam kejayaan Dinasti Abbasiyah. Artikel ini juga memperkenalkan bahwa sejarah lebih sering menunjukkan peran laki-laki dalam kepemimpinan, sementara peran perempuan yang penting seperti Khayzuran sering diabaikan. Ketidaksesuaian narasi sejarah adalah masalah yang digarisbawahi, terutama dalam hal menempatkan perempuan di balik kesuksesan politik dan pemerintahan yang signifikan. Hasil *Define Problems* ini terdapat pada paragraf berikut:

“Masa-masa keemasan dinasti Abbasiyah ternyata bukan hanya karena tangan dingin para pemimpin laki-laki. Ada sosok lain yang membuat dinasti ini kian berjaya. Tidak banyak yang tahu, ada perempuan hebat di balik suatu masa kegemilangan imperium Abbasiyah. Dia adalah Khayzuran bin ‘Atha’ (wafat 789), istri dari Al-Mahdi khalifah ketiga dinasti Abbasiyah sekaligus ibu dari dua khalifah penerusnya Musa Al-Hadi dan Harun Ar-Rasyid.”

Diagnose Causes. Artikel tersebut mengidentifikasi penyebabnya adalah bias budaya dan sejarah yang memprioritaskan dan mengakui kepemimpinan laki-laki, sementara peran perempuan, terutama di bidang kekuasaan dan politik, tidak mendapatkan pengakuan yang setara. Selain itu, ada kecenderungan untuk mengabaikan peran perempuan dalam kisah penting peradaban Islam. Kondisi ini juga diperparah oleh norma-norma patriarki yang secara historis mendominasi struktur sosial dan politik, sehingga peran perempuan seperti Khayzuran, meskipun signifikan, kerap dipinggirkan dalam catatan sejarah. Hasil *Diagnose Causes* tersebut bisa dibaca di paragraf berikut:

“Meskipun tidak ada catatan resmi tentang pencapaian politik Khayzuran, banyak bukti sejarah yang menunjukkan pengaruh besar yang dimilikinya. Salah

satunya adalah koin-koin yang dicetak dengan namanya, istana-istana yang dinamai menurut namanya, dan pemakaman kerajaan yang mengambil namanya sebagai nama. Semua ini menunjukkan tidak hanya kekuasaannya yang kuat, tetapi juga penghargaan dari rakyat.”

Moral Judgement. Artikel ini menciptakan penilaian moral tentang kecerdasan, keahlian, dan pengaruh Khayzuran sebagai seorang perempuan dalam dinasti Abbasiyah. Kesuksesannya dari hidup sebagai budak hingga menjadi ibu negara yang kuat dan berkuasa menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk memegang peran penting dalam sejarah politik dan kekuasaan. Ada pengakuan bahwa perempuan dapat memainkan peran strategis dalam kemajuan sebuah negara. Hasil *Moral Judgement* tersebut dapat dibaca di paragraf berikut:

“Itulah sepenggal kisah seorang perempuan yang memulai jalan hidupnya sebagai seorang budak, namun berakhir sebagai seorang ibu negara yang memberikan pengaruh besar pada sebuah imperium. Semua itu berkat kecerdasan, kepintaran, serta ketangguhannya dalam menghadapi setiap masalah.”

Treatment Recommendation. Artikel ini secara tidak langsung menyarankan pengakuan yang lebih besar terhadap peran perempuan dalam sejarah, terutama dalam kisah kejayaan Islam. Penulisan sejarah harus lebih inklusif, memasukkan tokoh perempuan seperti Khayzuran yang berkontribusi besar pada politik, pemerintahan, dan kemajuan peradaban. Berita ini juga menyerukan pendidikan yang lebih adil tentang peran perempuan dalam peradaban. Ini dilakukan agar masyarakat zaman sekarang lebih memahami dan menghargai peran perempuan dalam sejarah dan politik. Hal tersebut dapat dilihat di kalimat terakhir artikel:

“Sejarah Khayzuran pun menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran luar biasa dalam setiap jejak langkah peradaban dunia.”

Tabel 3.1. Analisis Artikel Berita dengan Judul “Khayzuran, Perempuan Berpengaruh di Masa Kejayaan Dinasti Abbasiyah”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	
	Banyak orang tidak tahu atau tidak mengakui peran penting perempuan dalam politik, contohnya dalam kejayaan Dinasti Abbasiyah. Sejarah lebih sering menunjukkan peran laki-laki dalam kepemimpinan, sementara peran perempuan yang penting seperti Khayzuran sering diabaikan.

<i>Diagnose</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	<i>Causes</i> Bias budaya dan sejarah yang memprioritaskan dan mengakui kepemimpinan laki-laki, sementara peran perempuan, terutama di bidang kekuasaan dan politik, tidak mendapatkan pengakuan yang setara.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Penilaian moral tentang kecerdasan, keahlian, dan pengaruh Khayzuran sebagai seorang perempuan dalam dinasti Abbasiyah. Perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk memegang peran penting dalam sejarah politik dan kekuasaan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pengakuan yang lebih besar terhadap peran perempuan dalam sejarah. Penulisan sejarah harus lebih inklusif, memasukkan tokoh perempuan yang berkontribusi besar pada politik.

2. Judul artikel: Membicarakan Pemimpin Perempuan di Politik Lokal Desa Saya
(*Feature*)



Gambar 3.2. Artikel “Membicarakan Pemimpin Perempuan di Politik Lokal Desa Saya” pada tampilan website Islam.co (<https://islami.co/membicarakan-pemimpin-perempuan-di-politik-lokal-desaya/> diakses pada 26 Oktober 2024)

Artikel yang ditulis oleh Khasan Ali ini terbit di rubrik Feature Islami.co pada 12 Mei 2023. Artikel ini mengulas tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam konteks kepemimpinan di politik lokal, khususnya di desa penulis. Meskipun seorang perempuan disebut sebagai calon kepala desa, respon masyarakat yang masih mengedepankan pandangan patriarki dan stereotipe negatif terhadap kepemimpinan perempuan muncul dengan kuat. Artikel ini menguraikan bagaimana pandangan tersebut seringkali hanya didasarkan pada perbedaan biologis dan

pemahaman agama yang bias. Menggunakan perspektif pemikiran feminis seperti Ali Syari'ati dan Simone de Beauvoir, artikel ini menyoroti pentingnya emansipasi perempuan melalui pembebasan dari stereotipe patriarki, pemberian ruang eksistensial di ruang publik, serta pergeseran relasi sosial. Artikel ini juga menegaskan bahwa perempuan, dengan segala potensinya, dapat berperan secara autentik dalam politik lokal jika diberikan akses dan kesempatan yang setara. Adapun hasil analisis artikel tersebut:

Define Problems. Masalah utama yang diangkat dalam artikel ini adalah sulitnya perempuan untuk mendapatkan posisi kepemimpinan dalam politik lokal karena adanya stereotipe dan bias patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Meskipun seorang perempuan dianggap sebagai calon kepala desa, masyarakat masih mempertanyakan kapasitas dan legitimasi perempuan untuk memimpin, dengan alasan yang berakar pada norma budaya dan agama. Hasil *Define Problems* ini terdapat pada paragraf berikut:

“Respon-respon itu terkadang membuatku geli, beberapa bikin miris dan kaget. Ternyata, kehidupan modern belum bisa mengubah cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan sepenuhnya.”

Diagnose Causes. Penyebab dari masalah tersebut adalah pandangan patriarki yang telah mendarah daging di masyarakat. Perempuan sering dinilai hanya berdasarkan realitas biologis mereka, dan kapasitas mereka diremehkan karena dianggap kurang sesuai untuk peran publik, terutama dalam kepemimpinan. Selain itu, nilai-nilai agama sering digunakan untuk menjustifikasi marginalisasi terhadap perempuan. Hasil *Diagnose Causes* tersebut bisa dibaca di paragraf berikut:

“Ada kecenderungan masyarakat memandang dan menilai perempuan hanya berdasarkan realitas biologisnya saja. Juga, dengan segala stereotip negatif yang disematkan terhadapnya.”

Moral Judgement. Penulis secara moral mengecam pandangan masyarakat yang menyingkirkan perempuan dari ruang publik, terutama politik. Ia berargumen bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menjalankan peran kepemimpinan. Perempuan seharusnya dinilai berdasarkan esensinya sebagai

manusia yang memiliki kreativitas dan potensi, bukan hanya berdasarkan gender atau atribut biologis. Hasil *Moral Judgement* tersebut dapat dibaca di paragraf berikut:

“Apakah pantas kita merendahkan dan meminggirkan perempuan, hanya karena perbedaan biologis? Jelas tidak! Karena pada hakikatnya, manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT.”

Treatment Recommendation. Artikel ini merekomendasikan beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini. Pertama, membebaskan perempuan dari definisi patriarki yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat, serta memberikan mereka akses yang sama dalam ruang publik, termasuk politik. Kedua, pentingnya pendekatan teologis yang menafsirkan agama secara lebih inklusif terhadap perempuan. Emansipasi perempuan harus melalui perubahan budaya, pemikiran, dan nilai-nilai yang bias gender. Hal tersebut dapat dilihat di kalimat:

“Beri perempuan ruang untuk bereksistensi di ruang publik, baik dalam pendidikan, kebudayaan, ekonomi, bahkan politik yang sama dengan laki-laki. Dengan demikian, perempuan tidak lagi dianggap sebagai *The Other*, alias liyan.”

Tabel 3.2. Analisis Artikel Berita dengan Judul “Membicarakan Pemimpin Perempuan di Politik Lokal Desa Saya”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Sulitnya perempuan untuk mendapatkan posisi kepemimpinan dalam politik lokal karena adanya stereotipe dan bias patriarki yang masih kuat dalam masyarakat.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pandangan patriarki yang telah mendarah daging di masyarakat.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Mengecam pandangan masyarakat yang menyingkirkan perempuan dari ruang publik, terutama politik. Ia berargumen bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menjalankan peran kepemimpinan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pertama, membebaskan perempuan dari definisi patriarki yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat, serta memberikan mereka akses yang sama dalam ruang publik, termasuk politik. Kedua, pentingnya pendekatan teologis yang menafsirkan agama secara lebih inklusif terhadap perempuan.

Sumber: Olah data peneliti (2024)

3. Judul artikel: Kesenjangan Gender, Islam dan Kepemimpinan Perempuan di Jawa (Tela'ah)



Gambar 3.3. Artikel “Kesenjangan Gender, Islam dan Kepemimpinan Perempuan di Jawa” pada tampilan website Islam.co (Sumber: <https://islami.co/kesenjangan-gender-islam-dan-kepemimpinan-perempuan-di-jawa/> diakses pada 26 Oktober 2024)

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Mujibuddin ini terbit di rubrik Tela'ah Islami.co pada 15 Mei 2023. Artikel ini membahas tentang kesenjangan gender dan kepemimpinan perempuan di Jawa, dengan menyoroti kesalahan dalam menerapkan perspektif gender Barat untuk menganalisis budaya Jawa. Penulis mengkritik generalisasi yang menganggap masyarakat Jawa sebagai patriarki tanpa memahami konteks sejarah dan sosial yang berbeda. Artikel ini menekankan bahwa kesenjangan gender sudah ada dalam masyarakat Jawa, terbukti dari kepemimpinan perempuan seperti Gayatri dan Tribhuwana Tungga Dewi pada era Majapahit. Di era modern, perempuan Jawa juga memiliki peran signifikan di berbagai bidang. Penulis mengusulkan agar pemahaman kesenjangan gender di Jawa dibangun berdasarkan sejarah dan budaya lokal, bukan dari perspektif Barat yang tidak relevan. Adapun hasil analisis artikel tersebut:

Define Problems. Artikel ini menyoroti perdebatan terkait kesenjangan gender dan kepemimpinan perempuan di Jawa, terutama dalam konteks sejarah dan budaya. Sering kali, masyarakat Jawa dianggap sebagai patriarki berdasarkan pandangan Barat, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas sosial dan sejarah masyarakat Jawa. Hasil *Define Problems* ini terdapat pada paragraf berikut:

“Banyak aspek kehidupan masyarakat di Jawa disinyalir sebagai bagian dari budaya patriarki... Anggapan itu salah satu bentuk analisis kesetaraan gender di Jawa dengan menggunakan perspektif Barat.”

Diagnose Causes. Penyebab masalah ini adalah generalisasi perspektif Barat dalam membaca dan menilai budaya Jawa. Perspektif gender Barat, yang muncul sebagai reaksi terhadap ketimpangan di Eropa pada abad 18-19, sering kali digunakan untuk menganalisis kesetaraan gender di Jawa, padahal konteks sosial, budaya, dan sejarahnya sangat berbeda. Ketimpangan di Barat tidak serta-merta dapat diterapkan untuk membaca realitas di Jawa. Hasil *Diagnose Causes* tersebut bisa dibaca di paragraf berikut:

“Generalisasi ini sangat keliru karena menyamakan adanya perspektif keilmuan gender Barat untuk membaca Timur... Ketika kita menggunakan perspektif itu, ada pemerkosaan teori karena budaya Barat dan budaya Jawa itu tidak sama.”

Moral Judgement. Artikel ini menyatakan bahwa asumsi Jawa sebagai masyarakat patriarki yang kuat adalah tidak sepenuhnya benar. Dalam sejarah Jawa, perempuan telah memainkan peran penting, termasuk dalam kepemimpinan. Contoh kepemimpinan perempuan di Jawa, seperti Gayatri dan Tribhuwana Tungga Dewi dari era Majapahit, menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukanlah hal asing dalam sejarah Jawa. Penulis juga menekankan bahwa masyarakat Jawa saat ini lebih terbuka terhadap kesetaraan gender, terutama dalam dunia kerja dan politik. Hasil *Moral Judgement* tersebut dapat dibaca di paragraf berikut:

“Kesetaraan gender itu sebenarnya sudah inheren dalam masyarakat Jawa, baik Jawa era Majapahit maupun era Indonesia modern.”

Treatment Recommendation. Artikel ini merekomendasikan agar kesetaraan gender di Jawa dipahami dalam konteks lokal, dengan melihat sejarah dan budaya Jawa sebagai referensi. Pemahaman kesetaraan gender yang relevan harus digali dari sejarah Jawa sendiri, daripada sekadar mengadopsi teori Barat yang tidak sesuai konteks. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam masyarakat Jawa modern dapat dibangun berdasarkan pengalaman lokal. Hal tersebut dapat dilihat di kalimat:

“Gali semua informasi tentang kesetaraan di Jawa untuk dijadikan referensi membangun kesetaraan masyarakat Indonesia modern, dari situlah teori

kesetaraan perempuan Jawa akan relevan untuk membangun kesetaraan masyarakat Jawa modern saat ini.”

Tabel 3.3. Analisis Artikel Berita dengan Judul “Kesetaraan Gender, Islam dan Kepemimpinan Perempuan di Jawa”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Sering kali, masyarakat Jawa dianggap sebagai patriarki berdasarkan pandangan Barat, yang tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas sosial dan sejarah masyarakat Jawa
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Generalisasi perspektif Barat dalam membaca dan menilai budaya Jawa.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Asumsi Jawa sebagai masyarakat patriarki yang kuat adalah tidak sepenuhnya benar.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Agar kesetaraan gender di Jawa dipahami dalam konteks lokal, dengan melihat sejarah dan budaya Jawa sebagai referensi. Pemahaman kesetaraan gender yang relevan harus digali dari sejarah Jawa sendiri, daripada sekadar mengadopsi teori Barat yang tidak sesuai konteks.

4. Judul artikel: Agensi Politik Perempuan dalam Budaya Populer (Kolom)



Gambar 3.4. Artikel “Agensi Politik Perempuan dalam Budaya Populer” pada tampilan website Islam.co (<https://islami.co/agensi-politik-perempuan-dalam-budaya-populer/>) diakses pada 26 Oktober 2024)

Artikel yang ditulis oleh Etika Philosophia ini terbit di rubrik Kolom Islami.co pada 31 Mei 2023. Artikel ini membahas keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, terutama terkait rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen dan tantangan sosial budaya yang mereka hadapi. Artikel ini mengaitkan fenomena

politik perempuan dengan budaya populer, menggunakan contoh tokoh Danerys Targaryen dari *Game of Thrones* untuk menggambarkan perjuangan perempuan di dunia politik yang sering dianggap sebagai domain laki-laki. Artikel ini juga menyoroti pentingnya pengarusutamaan gender dalam politik untuk memastikan kebijakan yang mewakili kepentingan perempuan. Selain itu, pentingnya kualitas dan kecakapan perempuan dalam politik menjadi fokus, bukan sekadar pemenuhan kuota. Adapun hasil analisis artikel tersebut:

Define Problems. Masalah utama yang didefinisikan dalam artikel ini adalah rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. Meskipun sudah ada regulasi yang mendukung kesetaraan gender, kenyataannya politik di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam parlemen masih jauh dari target minimal 30 persen, yang mencerminkan kesenjangan antara aspirasi kesetaraan dan realitas partisipasi perempuan dalam dunia politik. Hasil *Define Problems* ini terdapat pada paragraf berikut:

“Persoalannya, wahana politik di pemerintahan kita dari dulu sampai sekarang (masih) didominasi oleh politisi laki-laki. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan CEIC mencatatkan pada tahun 2021 persentase keterlibatan perempuan di parlemen (hanya) sebesar 21,89 %.”

Diagnose Causes. Penyebab dari masalah ini diidentifikasi sebagai bias gender yang masih mengakar kuat dalam masyarakat. Budaya sosial yang menempatkan dunia politik sebagai domain maskulin dan penuh intrik dianggap tidak cocok bagi perempuan. Selain itu, nilai-nilai sosial budaya tidak memberi akses dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk menduduki posisi sentral di lembaga politik. Artikel juga mencatat bagaimana aspirasi perempuan sering diabaikan karena sudut pandang yang diatur oleh laki-laki. Hasil *Diagnose Causes* tersebut bisa dibaca di paragraf berikut:

“Masalah yang dihadapi perempuan lebih disebabkan oleh nilai sosial budaya yang tidak memberi akses dan kesempatan menduduki posisi sentral di lembaga-lembaga politik. Dunia politik yang keras, sarat dengan persaingan, manipulatif, dan penuh intrik seolah diasosiasikan dengan kaum lelaki, dan dianggap tidak cocok bagi perempuan.”

Moral Judgement. Penilaian moral yang dibuat dalam artikel ini adalah bahwa diskriminasi gender dalam politik tidak hanya salah, tetapi juga tidak adil bagi perempuan yang memiliki kemampuan dan aspirasi politik. Artikel menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, dan representasi mereka sangat penting untuk memastikan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Gagasan bahwa perempuan tidak cocok untuk dunia politik dinilai sebagai perspektif yang bias dan perlu diubah. Hasil *Moral Judgement* tersebut dapat dibaca di paragraf berikut:

“Melihat bahwa selama ini, nilai, kepentingan, aspirasi, serta prioritas perempuan dalam menentukan langkah politik (seringnya) dilihat dari kacamata laki-laki. Padahal perempuan memiliki nilai, kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi yang berbeda.”

Treatment Recommendation. Rekomendasi dalam artikel ini adalah pentingnya pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam politik Indonesia. Pemerintah harus terus mendorong kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik, dengan tidak hanya berfokus pada kuota 30 persen, tetapi juga memastikan bahwa perempuan yang dipilih adalah individu yang kompeten dan layak. Perubahan nilai budaya yang androsentris juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam politik. Hal tersebut dapat dilihat di kalimat:

“Partisipasi politik perempuan saat ini dibutuhkan sebagai ikhtiar pengarusutamaan gender (*gender mainstream*). Upaya ini diwujudkan demi produk kebijakan dan instrumen hukum yang berbasis pada kepentingan perempuan.”

Tabel 3.4. Analisis Artikel Berita dengan Judul “Agensi Politik Perempuan dalam Budaya Populer”

<i>Define</i> (Pendefinisian Masalah)	<i>Problems</i>	Rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia, yang masih jauh dari target kuota minimal 30 persen.
<i>Diagnose</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	<i>Causes</i>	Bias gender yang mendalam dalam masyarakat yang membatasi akses perempuan ke politik.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)		Bias gender ini tidak adil dan tidak tepat. Perempuan juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan memimpin, namun sering diabaikan karena sudut pandang yang bias.

<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pengarusutamaan gender dalam politik, meningkatkan keterwakilan perempuan tidak hanya untuk memenuhi kuota, tetapi juga berdasarkan kecakapan dan kompetensi mereka. Perlu juga ada perubahan budaya sosial yang bias gender.
--	---

5. Judul artikel: Perempuan Memimpin: Tokoh-tokoh Perempuan yang Layak Didukung saat Pemilu 2024 (Kolom)



Gambar 3.5. Artikel “Perempuan Memimpin: Tokoh-tokoh Perempuan yang Layak Didukung saat Pemilu 2024” pada tampilan website Islam.co (<https://islami.co/perempuan-memimpin-tokoh-tokoh-perempuan-yang-layak-didukung-saat-pemilu-2024/> diakses pada 26 Oktober 2024)

Artikel yang ditulis oleh Ismi Rezki Amaliah ini terbit di rubrik Kolom Islam.co pada 16 September 2023. Artikel ini membahas pentingnya partisipasi perempuan dalam politik Indonesia menjelang Pemilu 2024. Penulis menyoroti pengalaman pribadinya dalam memilih pada Pemilu sebelumnya, yang dilakukan tanpa kesadaran penuh akan dampak politik terhadap kehidupan, terutama terkait isu-isu perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan anak. Artikel ini mendorong masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih pemimpin, dengan menekankan bahwa perempuan memiliki hak dan kapasitas untuk berperan dalam politik. Beberapa tokoh perempuan seperti Khofifah Indar Parawansa dan Yenny Wahid disebut sebagai contoh pemimpin potensial yang layak mendapat dukungan dalam Pemilu mendatang. Artikel ini menegaskan perlunya keterlibatan perempuan untuk

membangun kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender. Adapun hasil analisis artikel tersebut:

Define Problems. Masalah utama yang didefinisikan dalam artikel ini adalah kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin yang benar-benar memperhatikan isu-isu penting, terutama yang terkait dengan hak-hak dan kepentingan perempuan di Pemilu 2024. Hasil *Define Problems* ini terdapat pada paragraf berikut:

“Saat ikut Pemilu 2019, tidak lebih dari karena memiliki KTP dan sekedar menyoblos di TPS, tanpa berpikir panjang terhadap harapan bangsa ini ke depannya. ... percaturan politik lima tahun sekali itu sangat berimbas pada kehidupan kita sehari-hari, salah satunya terkait perempuan.”

Diagnose Causes. Penyebab utama dari masalah ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman yang mendalam dari pemilih muda, yang sebelumnya tidak terlalu peduli terhadap pilihan politik mereka. Selain itu, ada juga kebutuhan untuk pemimpin yang memperhatikan isu-isu perempuan, karena masih banyak permasalahan yang tidak tertangani dengan baik seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan anak. Hasil *Diagnose Causes* tersebut bisa dibaca di paragraf berikut:

“Ada beberapa kasus terkait perempuan yang membuat kepala berat, mulai dari hal sepele seperti *cat calling*, urusan perkawinan anak di Indonesia, hingga KDRT.”

Moral Judgement. Penilaian moral dari artikel ini adalah bahwa masyarakat, khususnya perempuan, harus lebih aktif dan cerdas dalam memilih pemimpin di Pemilu 2024. Pemimpin yang terpilih harus benar-benar memperjuangkan kepentingan dan hak perempuan, dan perempuan seharusnya dilihat sebagai pemimpin yang setara dengan laki-laki. Hasil *Moral Judgement* tersebut dapat dibaca di paragraf berikut:

“Perempuan Maju dengan Kapasitas, Bukan Jenis Kelamin... Semua segmen masyarakat, termasuk perempuan dapat berpartisipasi untuk kemajuan bangsa Indonesia.”

Treatment Recommendation. Rekomendasi yang diberikan adalah agar perempuan lebih banyak berpartisipasi dalam politik dan masyarakat harus

mendukung keterlibatan perempuan. Pemimpin perempuan yang memiliki kompetensi dan integritas harus dipertimbangkan sebagai calon pemimpin dalam Pemilu 2024, dengan contoh-contoh tokoh seperti Khofifah Indar Parawansa dan Yenny Wahid yang dianggap layak dan memiliki rekam jejak baik. Hal tersebut dapat dilihat di kalimat:

“Kepercayaan diri perempuan untuk berada di barisan terdepan saat Pemilu 2024 adalah sebuah gerakan positif yang harus kita dukung sepenuhnya... Untuk bakal Pemilu 2024, mari kita telaah beberapa tokoh perempuan yang memiliki kualitas kepemimpinan.”

Tabel 3.5. Analisis Artikel Berita dengan Judul “Perempuan Memimpin: Tokoh-tokoh Perempuan yang Layak Didukung saat Pemilu 2024”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin yang benar-benar memperhatikan isu-isu penting, terutama yang terkait dengan hak-hak dan kepentingan perempuan di Pemilu 2024.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Kurangnya kesadaran dan pemahaman yang mendalam dari pemilih muda, yang sebelumnya tidak terlalu peduli terhadap pilihan politik mereka.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Masyarakat, khususnya perempuan, harus lebih aktif dan cerdas dalam memilih pemimpin di Pemilu 2024. Pemimpin yang terpilih harus benar-benar memperjuangkan kepentingan dan hak perempuan, dan perempuan seharusnya dilihat sebagai pemimpin yang setara dengan laki-laki.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Agar perempuan lebih banyak berpartisipasi dalam politik dan masyarakat harus mendukung keterlibatan perempuan.

- Judul artikel: Pemilu 2024: Memberi Kesempatan Para Perempuan untuk Memimpin (Kolom)



Gambar 3.6. Artikel “Pemilu 2024: Memberi Kesempatan Para Perempuan untuk Memimpin” pada tampilan *website* Islam.co (<https://islami.co/pemilu-2024-memberi-kesempatan-para-perempuan-untuk-memimpin/> diakses pada 26 Oktober 2024)

Artikel yang ditulis oleh Fitri Fauziah ini terbit di rubrik Kolom Islami.co pada 18 September 2023. Artikel ini membahas peran penting perempuan dalam ranah politik Indonesia menjelang Pemilu 2024. Penulis menyoroti bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam berkontribusi terhadap politik, dengan membawa perspektif baru yang penting dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu perempuan. Artikel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik, termasuk diskriminasi struktural dan stereotip patriarkis yang menghambat partisipasi perempuan di ruang publik. Beberapa langkah yang direkomendasikan meliputi peningkatan pendidikan politik, penghapusan diskriminasi, dan dukungan partai politik bagi perempuan calon pemimpin. Artikel ini menegaskan pentingnya perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 demi terciptanya sistem politik yang inklusif dan berkeadilan. Adapun hasil analisis artikel tersebut:

Define Problems. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik dan kendala struktural serta sosial yang menghambat partisipasi perempuan di ranah publik, terutama dalam Pemilu 2024. Perempuan masih menghadapi stereotipe dan diskriminasi yang meminggirkan potensi mereka dalam politik. Hasil *Define Problems* ini terdapat pada paragraf berikut:

“Stereotipe serta sudut pandang patriarkis terhadap tafsiran agama semacam ini, menumbuhkan sikap misoginis yang menyulitkan perempuan untuk tumbuh dan berpartisipasi dalam ranah publik.”

Diagnose Causes. Diskriminasi struktural, stereotip gender, dan norma-norma sosial yang meminggirkan perempuan. Selain itu, kurangnya pendidikan dan kesadaran politik yang menyebabkan terbatasnya akses perempuan dalam politik, serta keyakinan umum bahwa politik adalah ranah laki-laki. Hasil *Diagnose Causes* tersebut bisa dibaca di paragraf berikut:

“Karena sikap diskriminasi dan misoginis yang selalu dihadapkan kepada perempuan, mereka akan terus-menerus mengalami prasangka dan pandangan yang dapat membuat hilangnya kepercayaan diri sendiri.”

Moral Judgement. Situasi ini dianggap tidak adil dan perlu segera di atasi untuk menciptakan sistem politik yang inklusif dan demokratis. Dalam konteks kesetaraan gender, perempuan memiliki hak dan kapasitas yang setara dengan laki-laki dalam berpartisipasi di bidang politik. Jika perempuan tetap terpinggirkan, maka akan sulit untuk mencapai keadilan sosial. Hasil *Moral Judgement* tersebut dapat dibaca di paragraf berikut:

“Perempuan berhak bersuara dan menyampaikan aspirasi serta pendapatnya, dan layak untuk menduduki kursi parlemen dan jabatan-jabatan tinggi negara.”

Treatment Recommendation. Meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan, menghapus diskriminasi struktural, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, dan mendorong partai politik untuk lebih aktif mendukung calon perempuan. Juga penting untuk menghilangkan stereotip bahwa perempuan hanya bisa berperan dalam ranah domestik. Hal tersebut dapat dilihat di kalimat:

“Mendorong partai politik untuk lebih banyak memberi kesempatan para perempuan untuk mencalonkan diri, baik di tingkat daerah maupun pusat. Juga diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-hak politik mereka.”

Tabel 3.6. Analisis Artikel Berita dengan Judul “Pemilu 2024: Memberi Kesempatan Para Perempuan untuk Memimpin”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	<i>Problems</i> Rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik dan kendala struktural serta sosial yang
---	--

	menghambat partisipasi perempuan di ranah publik, terutama dalam Pemilu 2024.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Diskriminasi struktural, stereotip gender, dan norma-norma sosial yang meminggirkan perempuan.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Situasi ini dianggap tidak adil dan perlu segera di atasi untuk menciptakan sistem politik yang inklusif dan demokratis.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan, menghapus diskriminasi struktural, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, dan mendorong partai politik untuk lebih aktif mendukung calon perempuan.

7. Judul artikel: Ternyata, Mayoritas Parpol Tidak Penuhi Minimal 30% Caleg Perempuan, Suara Perempuan Dipinggirkan? (Berita)



Gambar 3.7. Artikel “Ternyata, Mayoritas Parpol Tidak Penuhi Minimal 30% Caleg Perempuan, Suara Perempuan Dipinggirkan?” pada tampilan *website* Islam.co (<https://islami.co/ternyata-mayoritas-parpol-tidak-penuhi-minimal-30-caleg-perempuan-suara-perempuan-dipinggirkan/> diakses pada 26 Oktober 2024)

Artikel berita yang digarap langsung oleh redaksi Islami.co ini terbit pada 10 November 2023. Artikel ini membahas pelanggaran syarat keterwakilan perempuan minimal 30% dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 oleh mayoritas partai politik di Indonesia. Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memenuhi syarat di seluruh daerah pemilihan (dapil), sementara 17 partai lainnya gagal memenuhi

ketentuan ini. Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mengancam Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas pembiaran terhadap pelanggaran ini. Mereka mendesak agar partai yang tidak memenuhi syarat didiskualifikasi dan menyerukan peningkatan pengawasan serta partisipasi masyarakat untuk memastikan pemilu berjalan adil dan sesuai dengan undang-undang. Adapun hasil analisis artikel tersebut:

Define Problems. Sebagian besar partai politik di Indonesia tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan minimal 30% dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024, melanggar Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017. Hal ini menjadi ancaman terhadap inklusivitas dan kualitas demokrasi di Indonesia. Hasil *Define Problems* ini terdapat pada paragraf berikut:

“Hampir semua partai politik peserta pemilu tidak mencapai syarat paling sedikit 30% kandidat perempuan dalam daftar pencalonan.”

Diagnose Causes. Ada pembiaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kurangnya pengawasan ketat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap pelanggaran aturan ini. Selain itu, partai-partai politik menunjukkan kurangnya komitmen dalam mempromosikan keterwakilan perempuan. Hasil *Diagnose Causes* tersebut bisa dibaca di paragraf berikut:

“KPU jelas melakukan pembiaran atas pelanggaran sistem pencalonan pemilu dan amanat Undang-Undang.”

Moral Judgement. Situasi ini dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi, serta tidak menghormati hak-hak perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam proses politik. Hal ini juga mengancam representasi perempuan di parlemen yang berakibat pada kebijakan publik yang tidak responsif terhadap isu-isu gender. Hasil *Moral Judgement* tersebut dapat dibaca di paragraf berikut:

“Apabila dibiarkan, implikasi selanjutnya adalah keterwakilan perempuan yang timpang di parlemen dan kondisi ini berdampak pada kebijakan-kebijakan yang tidak mengakomodir hak perempuan.”

Treatment Recommendation. KPU didesak untuk mendiskualifikasi partai politik di daerah pemilihan (dapil) yang tidak memenuhi syarat keterwakilan

perempuan. Bawaslu juga diminta untuk lebih proaktif dalam mengawasi pelanggaran ini. Selain itu, publik dan masyarakat sipil diajak untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan ketidakpatuhan partai politik terhadap aturan keterwakilan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat di kalimat:

“Koalisi juga mengajak semua pihak, baik caleg perempuan, masyarakat sipil, dan pemilih untuk bersama-sama mengawasi proses penyelenggaraan pemilu agar berjalan adil, demokratis, berintegritas, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.”

Tabel 3.7. Analisis Artikel Berita dengan Judul “Ternyata, Mayoritas Parpol Tidak Penuhi Minimal 30% Caleg Perempuan, Suara Perempuan Dipinggirkan?”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Sebagian besar partai politik di Indonesia tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan minimal 30% dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024, melanggar Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Ada pembiaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kurangnya pengawasan ketat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap pelanggaran aturan ini. Selain itu, partai-partai politik menunjukkan kurangnya komitmen dalam mempromosikan keterwakilan perempuan.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Situasi ini dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi, serta tidak menghormati hak-hak perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam proses politik.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	KPU didesak untuk mendiskualifikasi partai politik di daerah pemilihan (dapil) yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Bawaslu juga diminta untuk lebih proaktif dalam mengawasi pelanggaran ini. Selain itu, publik dan masyarakat sipil diajak untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan ketidakpatuhan partai politik terhadap aturan keterwakilan perempuan.

8. Judul artikel: Tidak Boleh Lagi Diremehkan, Ini Sejumlah Bukti Kepemimpinan Perempuan dan Berhasil (*Feature*)



Gambar 3.8. Artikel “Tidak Boleh Lagi Diremehkan, Ini Sejumlah Bukti Kepemimpinan Perempuan dan Berhasil” pada tampilan website Islam.co (<https://islami.co/tidak-boleh-lagi-diremehkan-ini-sejumlah-bukti-kepemimpinan-perempuan-dan-berhasil/>) diakses pada 26 Oktober 2024)

Artikel berita yang ditulis oleh Aan Ainun Najib ini terbit di rubrik Feature Islami.co pada 31 Agustus 2024. Artikel ini membahas kesenjangan gender dalam kepemimpinan global, yang masih didominasi oleh laki-laki meskipun perempuan telah menunjukkan kemampuan memimpin dengan baik. Menggunakan contoh-contoh seperti Kamala Harris, Jacinda Ardern, dan aktivis perempuan lainnya, artikel ini menyoroti bagaimana perempuan di berbagai belahan dunia berhasil menentang stereotip dan diskriminasi gender. Mereka tidak hanya memimpin dengan sukses, tetapi juga memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok tertindas. Artikel ini juga menyerukan dukungan yang lebih besar bagi perempuan dalam kepemimpinan dan perlunya mengubah norma-norma gender tradisional. Adapun hasil analisis artikel tersebut:

Define Problems. Artikel menyoroti kesenjangan gender dalam kepemimpinan, dengan menyatakan bahwa perempuan masih terpinggirkan dari posisi kepemimpinan secara global. Hal ini ditekankan dengan data dari PBB. Hasil *Define Problems* ini terdapat pada paragraf berikut:

“Menurut data PBB per 2015, terdapat 18 perempuan pemimpin dunia, 12 perempuan sebagai pemimpin pemerintahan, 11 di antaranya merupakan

pemimpin negara terpilih. Perempuan-perempuan ini hanya satu persepuluh dari jumlah pimpinan negara yang tergabung dalam PBB.”

Diagnose Causes. Artikel menunjukkan bahwa norma sosial dan budaya, serta diskriminasi gender yang berlangsung lama, adalah penyebab utama perempuan kurang terwakili dalam kepemimpinan. Norma tradisional yang meragukan kemampuan perempuan dalam memimpin menjadi salah satu hambatnya. Hasil *Diagnose Causes* tersebut bisa dibaca di paragraf berikut:

“Selama bertahun-tahun, aktivis perempuan di seluruh Nigeria telah memanfaatkan media sosial untuk mengorganisir perubahan sosial. Upaya ini dalam upaya pembebasan gadis-gadis Chibok yang diculik oleh kelompok teroris Boko Haram, atau untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender.”

Moral Judgement. Penulis menilai bahwa diskriminasi terhadap perempuan dalam kepemimpinan adalah ketidakadilan, dengan menekankan bahwa perempuan seperti Kamala Harris, Jacinda Ardern, dan Bilkis Dadi telah membuktikan kemampuannya memimpin dengan sukses. Mereka tidak hanya memimpin negara, tetapi juga memperjuangkan hak-hak perempuan dan masyarakat yang tertindas. Hasil *Moral Judgement* tersebut dapat dibaca di paragraf berikut:

“Beberapa perempuan di dunia membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi seorang pemimpin, di antaranya adalah: Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat; Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru; Damilola Odufuwa dan Odunayo Eweniyi, aktivis hak perempuan di Nigeria; Bilkis Dadi, aktivis politik India.”

Treatment Recommendation. Artikel mendorong dukungan yang lebih besar bagi perempuan dalam kepemimpinan, serta menyerukan perubahan dalam norma-norma gender tradisional. Ada rekomendasi untuk lebih banyak literasi gender dan pengakuan atas kemampuan perempuan memimpin, dengan contoh-contoh sukses sebagai inspirasi. Hal tersebut dapat dilihat di kalimat:

“Dalam menghadapi oposisi yang kuat, wanita ini telah menjadi pengingat yang sama kuatnya tentang apa yang pantas untuk diperjuangkan. Oleh karena itu, perempuan tidak boleh lagi diremehkan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin.”

Tabel 3.8. Analisis Artikel Berita dengan Judul “Tidak Boleh Lagi Diremehkan, Ini Sejumlah Bukti Kepemimpinan Perempuan dan Berhasil”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Kesenjangan gender dalam kepemimpinan, dengan menyatakan bahwa perempuan masih terpinggirkan dari posisi kepemimpinan secara global.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Norma sosial dan budaya, serta diskriminasi gender yang berlangsung lama, adalah penyebab utama perempuan kurang terwakili dalam kepemimpinan. Norma tradisional yang meragukan kemampuan perempuan dalam memimpin menjadi salah satu hambatannya.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Diskriminasi terhadap perempuan dalam kepemimpinan adalah ketidakadilan, dengan menekankan bahwa perempuan seperti Kamala Harris, Jacinda Ardern, dan Bilkis Dadi telah membuktikan kemampuannya memimpin dengan sukses.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Dukungan yang lebih besar bagi perempuan dalam kepemimpinan, serta menyerukan perubahan dalam norma-norma gender tradisional. Ada rekomendasi untuk lebih banyak literasi gender dan pengakuan atas kemampuan perempuan memimpin, dengan contoh-contoh sukses sebagai inspirasi.

9. Judul artikel: Bagaimana Narasi Perempuan Politik Dikisahkan dalam Sejarah Islam dan Efeknya Hari Ini



Gambar 3.9. Artikel “Bagaimana Narasi Perempuan Politik Dikisahkan dalam Sejarah Islam dan Efeknya Hari Ini” pada tampilan website Islam.co (<https://islami.co/bagaimana-narasi-perempuan-politik/> diakses pada 26 Oktober 2024)

Artikel berita yang ditulis oleh Supriansyah ini terbit di situs Islami.co pada 16 Oktober 2024. Artikel ini membahas tentang keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya dalam Pilkada, dengan fokus pada calon gubernur perempuan di Surabaya dan penggunaan narasi agama dalam mempengaruhi persepsi publik. Meskipun masih ada serangan yang mendiskreditkan kemampuan perempuan berdasarkan dalil agama, beberapa kandidat perempuan justru menggunakan otoritas agama untuk menantang stereotip tersebut. Artikel ini juga mengulas buku *Fikih Kepemimpinan Politik Perempuan*, yang menyoroti sejarah peran perempuan dalam Islam dan menyajikan pandangan progresif mengenai hak-hak dan kepemimpinan perempuan. Penulis buku mengupas isu gender dalam politik dari perspektif fikih dan sosial, serta menguraikan perjuangan perempuan dalam menghadapi tantangan politik dan sosial. Artikel ini menekankan pentingnya mendukung keterwakilan perempuan di ruang publik dengan meruntuhkan hambatan sosial dan hukum yang masih membatasi peran mereka. Adapun hasil analisis artikel tersebut:

Define Problems. Masalah utama yang diangkat dalam artikel adalah bagaimana perempuan masih sering kali menghadapi hambatan dalam berpartisipasi di ranah politik, terutama yang berkaitan dengan persepsi negatif yang dilandasi oleh agama dan sosial. Hasil *Define Problems* ini terdapat pada paragraf berikut:

“Di tengah gegap gempita kampanye, kita masih menjumpai 'serangan' terhadap calon-calon perempuan, mulai dari dalil agama hingga tuduhan inkompetensi dalam memimpin daerah.”

Diagnose Causes. Penyebab masalah ini berkaitan dengan interpretasi agama yang bias gender, stereotip sosial tentang peran perempuan, serta hambatan historis yang membatasi perempuan dalam politik. Persepsi yang menempatkan perempuan sebagai pemimpin yang kurang kompeten sering kali dilandasi oleh pandangan tradisional yang memperkuat diskriminasi terhadap perempuan. Hasil *Diagnose Causes* tersebut bisa dibaca di paragraf berikut:

“Di sisi lain, sebagian calon perempuan melawan dengan menggunakan otoritas agama guna mengubah persepsi negatif atas kepemimpinan perempuan yang terlanjur terbangun dan bertahan hingga hari ini.”

Moral Judgement. Artikel ini memberikan penilaian bahwa penggunaan tafsir agama dan stereotipe sosial yang merendahkan perempuan sebagai pemimpin adalah salah. Artikel menunjukkan bagaimana beberapa perempuan telah berusaha melawan persepsi negatif tersebut dengan cara-cara yang sah dan legitimatif, termasuk menggunakan literasi agama yang lebih inklusif dan progresif. Ini dianggap sebagai langkah moral yang tepat untuk menantang diskriminasi berbasis gender. Hasil *Moral Judgement* tersebut dapat dibaca di paragraf berikut:

“Oleh sebab itu, sebenarnya kita tidak lagi perlu mempermasalahkan isu ini. Literasi terkait perempuan dan politik pun turut bertambah.”

Treatment Recommendation. Solusi yang direkomendasikan adalah untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan terkait peran perempuan dalam sejarah, hukum, dan politik, serta mendorong masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menghilangkan batasan-batasan yang merugikan perempuan. Buku *Fikih Kepemimpinan Politik Perempuan* menjadi contoh penting dalam mengubah persepsi negatif melalui penyajian data sejarah yang faktual serta kajian agama yang progresif. Hal tersebut dapat dilihat di kalimat:

“Buku ini mengulas perempuan dari sisi normativitas hingga sosio-politik di sepanjang sejarah umat Islam. Ulasan fikih yang sering kali njelimet dan kompleks terkait perempuan, ditulis dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami.”

Tabel 3.9. Analisis Artikel Berita dengan Judul “Bagaimana Narasi Perempuan Politik Dikisahkan dalam Sejarah Islam dan Efeknya Hari Ini”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Perempuan masih sering kali menghadapi hambatan dalam berpartisipasi di ranah politik, terutama yang berkaitan dengan persepsi negatif yang dilandasi oleh agama dan sosial.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Interpretasi agama yang bias gender, stereotip sosial tentang peran perempuan, serta hambatan historis yang membatasi perempuan dalam politik.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Penggunaan tafsir agama dan stereotipe sosial yang merendahkan perempuan sebagai pemimpin adalah salah.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Meningkatkan literasi dan pengetahuan terkait peran perempuan dalam sejarah, hukum, dan politik, serta mendorong masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menghilangkan batasan-batasan yang merugikan perempuan.

10. Judul artikel: Politik Misoginis dan Seksis Mewarnai Pilkada 2024, Mau Maju kok Pikirannya Mundur Gitu (Kolom)



Gambar 3.10. Artikel “Politik Misoginis dan Seksis Mewarnai Pilkada 2024, Mau Maju kok Pikirannya Mundur Gitu” pada tampilan *website* Islam.co (<https://islami.co/politik-misoginis-dan-seksis-mewarnai-pilkada-2024-mau-maju-kok-pikirannya-mundur-gitu/> diakses pada 26 Oktober 2024)

Artikel berita yang ditulis oleh Ifa Mualifa ini terbit di rubrik Kolom Islami.co pada 18 Oktober 2024. Artikel ini membahas isu misoginis dan seksis yang masih kuat mewarnai politik Indonesia, khususnya dalam Pilkada 2024. Meskipun keterlibatan perempuan dalam politik terus meningkat, beberapa politisi dan kampanye masih mengedepankan retorika yang merendahkan perempuan sebagai pemimpin. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya patriarki dan seksisme masih menjadi penghalang bagi kemajuan politik yang inklusif. Artikel ini menyoroti pentingnya menghilangkan diskriminasi berbasis gender dalam politik, serta mendorong perspektif gender yang lebih inklusif untuk menciptakan politik yang berperadaban dan mendukung kemajuan masyarakat. Adapun hasil analisis artikel tersebut:

Define Problems. Masalah utama yang ditekankan dalam artikel ini adalah masih kuatnya budaya misoginis dan seksis dalam politik Pilkada 2024 di Indonesia, yang menghalangi partisipasi perempuan sebagai pemimpin. Tindakan-tindakan seksis tersebut terlihat dalam kampanye negatif terhadap calon perempuan dan retorika yang merendahkan perempuan sebagai pemimpin. Hasil *Define Problems* ini terdapat pada paragraf berikut:

"Sebuah spanduk besar yang terpampang di suatu jalan dengan foto calon pasangan bertuliskan '*Milih Imam (Pemimpin) Kok Wedok. Jangan Ya Dik Ya! Imam (Pemimpin) Kudu Lanang*'. Dua fenomena di atas, setidaknya mengingatkan kita semua bahwa politik misoginis masih mewarnai Pilkada 2024."

Diagnose Causes. Penyebab masalah ini berakar pada budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia, yang menganggap perempuan tidak pantas menjadi pemimpin. Selain itu, interpretasi agama yang bias dan stereotip gender juga mendukung diskriminasi ini. Hal ini menghalangi kemajuan demokrasi yang seharusnya inklusif bagi semua gender. Hasil *Diagnose Causes* tersebut bisa dibaca di paragraf berikut:

"Budaya seksis dan misoginis semacam ini, tidak boleh dinormalisasi. Sebab akan berdampak terhadap bagaimana perilaku masyarakat dalam memilih pemimpin."

Moral Judgement. Penilaian moral dalam artikel ini menekankan bahwa kampanye misoginis dan seksis adalah bentuk mundurnya pola pikir politisi, serta bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mendorong keterwakilan dan partisipasi semua gender. Pandangan misoginis dianggap tidak berperadaban dan harus dikritik sebagai langkah moral untuk mencapai politik yang lebih maju dan inklusif. Hasil *Moral Judgement* tersebut dapat dibaca di paragraf berikut:

"Politisi-politisi yang masih menggunakan pendekatan misoginis dalam kampanye, berarti ia tidak memiliki celah lain untuk menjadi lawan yang sehat dalam politik."

Treatment Recommendation. Rekomendasi solusi yang diberikan adalah agar politisi dan masyarakat mendukung politik yang lebih inklusif dan berperspektif gender. Misogini dan seksisme dalam politik harus dihapuskan agar politik Indonesia dapat maju dan menghasilkan pemimpin yang kompeten, terlepas dari gender. Selain itu, politisi diharapkan lebih fokus pada isu-isu nyata seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat di kalimat:

"Pesan bagi para politisi yang masih misoginis, jangan berpikir memimpin masyarakat dahulu sebelum bisa berpikir inklusif dan berkemajuan."
"Teruntuk kita semua, mari menjadi bagian dari masyarakat yang mendukung terciptanya politik berperadaban dan berkemajuan."

Tabel 3.10. Analisis Artikel Berita dengan Judul “Politik Misoginis dan Seksis Mewarnai Pilkada 2024, Mau Maju kok Pikirannya Mundur Gitu”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Masih kuatnya budaya misogynis dan seksis dalam politik Pilkada 2024 di Indonesia, yang menghalangi partisipasi perempuan sebagai pemimpin.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia, yang menganggap perempuan tidak pantas menjadi pemimpin.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Kampanye misogynis dan seksis adalah bentuk mundurnya pola pikir politisi, serta bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mendorong keterwakilan dan partisipasi semua gender.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Agar politisi dan masyarakat mendukung politik yang lebih inklusif dan berperspektif gender. Misogini dan seksisme dalam politik harus dihapuskan agar politik Indonesia dapat maju dan menghasilkan pemimpin yang kompeten, terlepas dari gender.

11. Judul artikel: Tidak Lebih dari 15 Persen Jadi Menteri, Komitmen Pemerintah soal Isu Perempuan Dinilai Kurang (Berita)



Gambar 3.11. Artikel “Tidak Lebih dari 15 Persen Jadi Menteri, Komitmen Pemerintah soal Isu Perempuan Dinilai Kurang” pada tampilan website Islam.co (<https://islami.co/tidak-lebih-dari-15-persen-jadi-menteri-komitmen-pemerintah-soal-isu-perempuan-dinilai-kurang/> diakses pada 28 Desember 2024)

Artikel berita yang ditulis oleh Ahmad Mulyadi ini terbit di rubrik Berita Islami.co pada 28 Oktober 2024. Artikel ini membahas rendahnya keterwakilan perempuan dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Rakabumi Raka, yang hanya mencapai kurang dari 15 persen, jauh dari target minimal 30 persen.

Penyebab utama kondisi ini adalah dominasi laki-laki dalam politik, stigma negatif terhadap perempuan, dan penafsiran agama yang subordinatif. Meskipun pemerintah telah menetapkan kuota keterwakilan perempuan, implementasinya belum optimal di berbagai lini. Diskusi yang digelar oleh Islami.co dan Rumah KitaB, serta buku Fikih Kepemimpinan Politik Perempuan, menawarkan solusi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ruang publik melalui literasi, diskusi kritis, dan tekanan publik. Artikel ini menekankan pentingnya mendorong keterwakilan perempuan demi mewujudkan demokrasi yang inklusif dan setara. Adapun hasil analisis artikel tersebut:

Define Problems. Masalah yang diangkat adalah rendahnya keterwakilan perempuan di dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Rakabumi Raka, yang hanya mencapai kurang dari 15 persen, jauh dari target minimal 30 persen yang direkomendasikan. Selain itu, penafsiran agama yang subordinatif terhadap perempuan memperburuk situasi ini, menghambat perempuan untuk aktif di ruang politik. Hasil *Define Problems* ini terdapat pada paragraf berikut:

“Keterwakilan perempuan di panggung politik masih jauh dari harapan. Pasalnya, meskipun kuota minimal disediakan 30 persen tetapi belum merambah ke semua lini.”

Diagnose Causes. Penyebab utama dari rendahnya keterwakilan perempuan adalah budaya patriarki yang mengakar, dominasi laki-laki dalam politik, dan interpretasi agama yang mendiskreditkan peran perempuan di ruang publik. Stigma negatif terhadap perempuan yang aktif dalam politik, seperti dianggap ambisius dalam konotasi negatif, juga menjadi penghalang. Hasil *Diagnose Causes* tersebut bisa dibaca di paragraf berikut:

“Perempuan yang berjuang masih kerap mendapat stigma negatif dari sebagian laki-laki. Perempuan yang berkiprah di politik masih dianggap ambisius, yang lebih condong bermakna negatif.”

Moral Judgement. Ketidaksetaraan dalam keterwakilan perempuan di politik dianggap sebagai masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya inklusif dan setara. Stigma negatif terhadap perempuan dalam politik mencerminkan

ketidakadilan yang harus dilawan. Hasil *Moral Judgement* tersebut dapat dibaca di paragraf berikut:

“Kata Prof Iba, sapaannya, bahwa keterwakilan perempuan di panggung politik masih jauh dari harapan.”

“Untuk itulah, ia mengajak masyarakat agar bersama-sama berjuang menyuarkan partisipasi perempuan di ruang publik.”

Treatment Recommendation. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan tekanan publik agar pemerintah memperhatikan keterwakilan perempuan di ruang politik. Diskusi, literasi, dan buku seperti *Fikih Kepemimpinan Politik Perempuan* dapat menjadi dasar untuk mematahkan penafsiran agama yang bias dan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak politik perempuan dalam Islam. Hal tersebut dapat dilihat di kalimat:

“Ayo, pressure publik jadi penting.”

“Dan buku ini merupakan hasil diskusi tersebut menguraikan bagaimana Islam memandang hak-hak politik bagi perempuan beserta latar belakang sejarahnya.”

Tabel 3.11. Analisis Artikel Berita dengan Judul “Tidak Lebih dari 15 Persen Jadi Menteri, Komitmen Pemerintah soal Isu Perempuan Dinilai Kurang”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Rendahnya keterwakilan perempuan di dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Rakabumi Raka, yang hanya mencapai kurang dari 15 persen, jauh dari target minimal 30 persen yang direkomendasikan.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Budaya patriarki yang mengakar, dominasi laki-laki dalam politik, dan interpretasi agama yang mendiskreditkan peran perempuan di ruang publik
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Ketidaksetaraan dalam keterwakilan perempuan di politik dianggap sebagai masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Memberikan tekanan publik agar pemerintah memperhatikan keterwakilan perempuan di ruang politik.

12. Judul artikel: Isu Kepemimpinan Perempuan dalam Politik Kini Dinilai Lebih Mundur, Sejarah Islam Lebih Kaya (Kilas)



Gambar 3.12. Artikel “Isu Kepemimpinan Perempuan dalam Politik Kini Dinilai Lebih Mundur, Sejarah Islam Lebih Kaya” pada tampilan *website* Islam.co (<https://islami.co/isu-kepemimpinan-perempuan-dalam-politik-kini-dinilai-lebih-mundur-sejarah-islam-lebih-kaya/> diakses pada 28 Desember 2024)

Artikel berita yang ditulis oleh Nurul Anwar ini terbit di rubrik Kilas Islami.co pada 28 Oktober 2024. Artikel ini membahas isu kepemimpinan perempuan dalam politik Islam yang dinilai mengalami kemunduran dibandingkan masa lalu, baik secara historis maupun teologis. Usman Hamid dari Rumah KitaB menekankan bahwa sistem patriarki tidak berasal dari ajaran Islam, dengan banyak dalil dalam sejarah Islam mendukung kepemimpinan perempuan. Direktur Rumah KitaB, Erni Agustini, menyoroti pentingnya peran aktif perempuan di politik Indonesia, menekankan bahwa partisipasi perempuan harus bermakna dan mampu mendorong perubahan yang inklusif serta adil. Diskusi ini berlangsung di Outlier Cafe, dalam acara peluncuran buku *Fikih Kepemimpinan Politik Perempuan*, yang bertujuan menciptakan ruang dialog untuk memperkuat pemahaman dan keterlibatan perempuan dalam politik. Adapun hasil analisis artikel tersebut:

Define Problems. Masalah yang ditekankan dalam artikel ini adalah menurunnya perhatian terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik Islam di era modern, yang justru lebih sempit dibandingkan masa lalu. Artikel ini juga menyoroti adanya ketimpangan struktur kekuasaan yang berpusat pada laki-laki. Hasil *Define Problems* ini terdapat pada paragraf berikut:

“Usman Hamid menilai, isu kepemimpinan perempuan dalam politik Islam belakangan menurun. Bahkan, kata dia, jika ditinjau dalam aspek sejarah dan teologis, justru ada kecenderungan lebih sempit.”

Diagnose Causes. Penyebab utama masalah ini adalah dominasi sistem patriarki yang telah mengakar kuat dalam struktur kekuasaan dan penafsiran agama yang cenderung subordinatif terhadap perempuan. Selain itu, persepsi sosial terhadap perempuan di politik sebagai subordinat turut memperkuat masalah ini. Hasil *Diagnose Causes* tersebut bisa dibaca di paragraf berikut:

“Sebab landasan-landasan historis dan teologis inilah kita jadi tahu bahwa sistem patriarki atau konstruksi struktur kekuasaan yang berpusat pada laki-laki sebenarnya bukan bersumber pertama kali dalam ajaran Islam.”

Moral Judgement. Kepemimpinan perempuan dianggap memiliki nilai yang setara dengan laki-laki dan berperan penting dalam menciptakan kesetaraan serta keadilan. Keterlibatan perempuan di ranah politik juga dinilai sebagai langkah penting untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada kelompok rentan. Hasil *Moral Judgement* tersebut dapat dibaca di paragraf berikut:

“Perempuan memiliki banyak peran dan potensi yang tidak kalah dengan laki-laki. Baik itu ia terlibat di berbagai aspek di politik, kemampuannya membentuk narasi sosial untuk perubahan maupun menciptakan ruang kesetaraan dan keadilan.”

Treatment Recommendation. Diperlukan dorongan untuk partisipasi perempuan yang lebih bermakna, bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dampaknya terhadap sistem dan kebijakan. Selain itu, penting untuk menyediakan ruang diskusi untuk membentuk komunitas yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik berdasarkan pemahaman agama yang inklusif. Hal tersebut dapat dilihat di kalimat:

“Kita berharap partisipasi perempuan ini bukan sekadar jumlah, tapi partisipasi yang bermakna sehingga perempuan di sini mampu untuk mendorong perubahan baik itu dari sistem, kebijakan yang berpihak kepada perempuan, kelompok marjinal dan juga disabilitas.”

Tabel 3.12. Analisis Artikel Berita dengan Judul “Isu Kepemimpinan Perempuan dalam Politik Kini Dinilai Lebih Mundur, Sejarah Islam Lebih Kaya”

<i>Define</i> (Pendefinisian Masalah)	<i>Problems</i> Menurunnya perhatian terhadap kepemimpinan perempuan dalam politik Islam di era modern, yang justru lebih sempit dibandingkan masa lalu.
--	---

<i>Diagnose</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	<i>Causes</i> Dominasi sistem patriarki yang telah mengakar kuat dalam struktur kekuasaan dan penafsiran agama yang cenderung subordinatif terhadap perempuan.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Kepemimpinan perempuan dianggap memiliki nilai yang setara dengan laki-laki dan berperan penting dalam menciptakan kesetaraan serta keadilan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Dorongan untuk partisipasi perempuan yang lebih bermakna, bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi juga dampaknya terhadap sistem dan kebijakan.

13. Judul artikel: Kepemimpinan Politik Perempuan Rendah, Rumah KitaB Tawarkan Wacana Alternatif agar Agama Jadi Inspirasi Kesetaraan (Berita)



Gambar 3.13. Artikel “Kepemimpinan Politik Perempuan Rendah, Rumah KitaB Tawarkan Wacana Alternatif agar Agama Jadi Inspirasi Kesetaraan” pada tampilan *website* Islam.co (<https://islami.co/kepemimpinan-politik-perempuan-rendah-rumah-kitab-tawarkan-wacana-alternatif-agar-jadi-inspirasi-kesetaraan/>) diakses pada 1 Januari 2024)

Artikel berita yang ditulis oleh Achmat Hilmi, Lc ini terbit di rubrik Berita Islami.co pada 28 Oktober 2024. Artikel ini membahas rendahnya keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan politik di Indonesia meskipun terdapat regulasi yang mendukung kesetaraan gender, seperti UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 68 Tahun 1958. Hingga tahun 2024, partisipasi perempuan di legislatif hanya mencapai 22,1%, jauh dari target minimal 30%. Penyebab utama yang diidentifikasi adalah interpretasi agama yang keliru, dominasi patriarkisme dalam politik, serta kurangnya kehendak partai politik dan organisasi untuk mendukung peran perempuan. Diskusi buku *Fikih Kepemimpinan Politik Perempuan* menggarisbawahi

pentingnya mendekonstruksi pandangan subordinatif terhadap perempuan, menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan sistem patriarki. Artikel ini menekankan perlunya menciptakan ruang politik yang lebih ramah, dengan partisipasi perempuan yang bermakna untuk mendorong keadilan dan perubahan kebijakan yang inklusif. Adapun hasil analisis artikel tersebut:

Define Problems. Masalah yang diangkat dalam berita ini adalah rendahnya keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik di Indonesia, meskipun regulasi hukum sudah mendukung kesetaraan gender. Keterbatasan ini diperparah oleh interpretasi agama yang cenderung subordinatif terhadap perempuan dan kurangnya kehendak politik dari partai serta organisasi. Hasil *Define Problems* ini terdapat pada paragraf berikut:

“Rupanya, implementasi regulasi tersebut masih di bawah harapan, hingga tahun 2024, keterwakilan perempuan di legislatif hanya 22,1 persen tertinggi sejak 27 tahun pasca reformasi, atau sejak 66 tahun diberlakukannya UU 68/1958 keterlibatan perempuan belum mencapai keadilan.”

Diagnose Causes. Penyebab rendahnya partisipasi perempuan dalam politik meliputi: Interpretasi agama yang keliru digunakan untuk mendiskreditkan perempuan, Patriarkisme dalam politik yang mempersempit ruang perempuan, dan Kurangnya kehendak partai politik dan organisasi untuk mendukung kepemimpinan perempuan. Hasil *Diagnose Causes* tersebut bisa dibaca di paragraf berikut:

“Patriarkisme dalam politik telah mengambil isu agama untuk mempersempit partisipasi perempuan dalam politik.”
“Pertanyaan kemudian muncul, apakah partai politik memperjuangkan perempuan? Semua kembali kepada kehendak politik dari partai-partai yang ada.”

Moral Judgement. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik mencerminkan ketidakadilan struktural. Perspektif maskulin yang dominan belum berpihak pada perempuan, meskipun perempuan memiliki hak yang setara dalam partisipasi politik. Buku *Fikih Kepemimpinan Politik Perempuan* diapresiasi sebagai upaya membangun ruang yang lebih ramah bagi perempuan dalam politik. Hasil *Moral Judgement* tersebut dapat dibaca di paragraf berikut:

“Elva melontarkan kritik pada maskulinitas dunia politik, seringkali perspektif orang-orang di dalamnya belum berpihak pada perempuan, belum memberikan

kesempatan yang adil dan setara pada perempuan.”
 “Buku *Fikih Kepemimpinan Politik Perempuan* berhasil mengangkat ruang yang ramah dalam kepemimpinan politik perempuan.”

Treatment Recommendation. Berita ini merekomendasikan untuk: Mengkritisi dan memperbaiki interpretasi agama yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinatif, Meningkatkan kehendak politik partai dan organisasi untuk mendukung keterwakilan perempuan, dan Memberi peluang bagi perempuan untuk berperan secara bermakna di dunia politik dan ruang publik lainnya. Hal tersebut dapat dilihat di kalimat:

“Dengan menyadari banyaknya dalil-dalil yang menyebutkan peran dan kepemimpinan perempuan, lanjutnya, dalam Islam ditegaskan kalau sistem patriarki tidak diajarkan dalam Islam.”
 “Kita berharap partisipasi perempuan ini bukan sekadar jumlah, tapi partisipasi yang bermakna sehingga perempuan di sini mampu untuk mendorong perubahan baik itu dari sistem, kebijakan yang berpihak kepada perempuan.”

Tabel 3.13. Analisis Artikel Berita dengan Judul “Kepemimpinan Politik Perempuan Rendah, Rumah KitaB Tawarkan Wacana Alternatif agar Agama Jadi Inspirasi Kesetaraan”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Rendahnya keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik di Indonesia.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Interpretasi agama yang keliru digunakan untuk mendiskreditkan perempuan, Patriarkisme dalam politik yang mempersempit ruang perempuan, dan Kurangnya kehendak partai politik dan organisasi untuk mendukung kepemimpinan perempuan.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik mencerminkan ketidakadilan struktural.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Mengkritisi dan memperbaiki interpretasi agama yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinatif, Meningkatkan kehendak politik partai dan organisasi untuk mendukung keterwakilan perempuan, dan Memberi peluang bagi perempuan untuk berperan secara bermakna di dunia politik dan ruang publik lainnya.

14. Judul artikel: Objektifikasi Perempuan dalam Politik yang Semakin ke Sini Semakin ke Sana (Pakar)



Gambar 3.14. Artikel “Objektifikasi Perempuan dalam Politik yang Semakin ke Sini Semakin ke Sana” pada tampilan *website* Islami.co (<https://islami.co/objektifikasi-perempuan-dalam-politik-yang-semakin-ke-sini-semakin-ke-sana/> diakses pada 1 Januari 2024)

Artikel berita yang ditulis oleh Sarjoko S. ini terbit di rubrik Berita Islami.co pada 29 Oktober 2024. Artikel ini mengkritisi objektifikasi perempuan dalam politik, baik di lingkup kampus sebagai miniatur negara maupun dalam pemerintahan nasional di era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di kampus, meskipun jumlah mahasiswa perempuan dominan, posisi struktural masih didominasi laki-laki, mencerminkan ketimpangan gender. Hal serupa terjadi di politik nasional, di mana perempuan hanya menempati lima posisi dari total 41 menteri, dengan dominasi laki-laki bahkan di komisi DPR yang menangani isu perempuan. Artikel ini menyoroti kurangnya keberpihakan partai politik terhadap perempuan, meski regulasi afirmatif sudah ada, dan mempertanyakan klaim minimnya kader perempuan sebagai alasan keterwakilan rendah. Ditegaskan bahwa perempuan harus menjadi subjek dalam urusan mereka sendiri, bukan diobjektifikasi oleh sistem politik yang masih patriarkal. Adapun hasil analisis artikel tersebut:

Define Problems. Masalah utama yang diangkat dalam berita ini adalah rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik dan objektifikasi perempuan dalam sistem politik, baik di kampus sebagai miniatur negara maupun dalam pemerintahan nasional. Hasil *Define Problems* ini terdapat pada paragraf berikut:

“Jumlah pimpinan di lembaga-lembaga kampus masih didominasi oleh laki-laki dengan jumlah yang sangat timpang.”

“Tampaknya menyebut kampus miniatur negara menemukan keabsahannya.”

“Di Komisi VIII yang mengurus agama, sosial, perempuan, dan anak, kelima pimpinannya adalah laki-laki!”

Diagnose Causes. Penyebab utama peminggiran perempuan dalam politik diidentifikasi sebagai: Dominasi laki-laki dalam struktur politik dan kampus, Penggunaan agama dan nilai-nilai patriarki untuk menjustifikasi ketimpangan gender, dan Kurangnya iktikad partai politik untuk melibatkan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Hasil *Diagnose Causes* tersebut bisa dibaca di paragraf berikut:

“Laporan tersebut menyebutkan ‘Karier laki-laki di dunia akademis lancar di setiap jenjang. Sementara pada perempuan, karier hanya lancar atau lebih baik di tahap awal.’”

“Selain komposisi kabinet, ‘owalah moment’ juga terjadi ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumumkan 13 komisi bidang kerja selama lima tahun ke depan. Di Komisi VIII... kelima pimpinannya adalah laki-laki!”

“Namun kita perlu memasang kaca mata skeptis terkait pernyataan itu. Apakah benar mereka sudah mengupayakannya atau justru terjadi praktik peminggiran di berbagai proses pelibatan perempuan?”

Moral Judgement. Sistem politik yang meminggirkan perempuan dianggap tidak adil dan gagal merealisasikan tujuan afirmasi gender. Ketidakadilan ini mencerminkan lemahnya implementasi regulasi afirmatif dan menjadikan perempuan sebagai objek dalam urusan mereka sendiri. Hasil *Moral Judgement* tersebut dapat dibaca di paragraf berikut:

“Mengabstensi perempuan dari urusan perempuan adalah bentuk objektifikasi yang paripurna dari sistem politik kita hari ini.”

“Meski jumlah 5 ini tergolong ‘not bad’ jika disandingkan dengan jumlah menteri di masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya... angka lima tergolong memprihatinkan di tengah semakin melimpahnya perempuan yang punya kapasitas untuk menjadi pemimpin di berbagai sektor.”

Treatment Recommendation. Solusi yang diajukan mencakup: Memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi subjek dalam urusan mereka sendiri, Partai politik harus menunjukkan iktikad baik dengan mendukung keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, dan Mengubah formasi pimpinan di lembaga politik untuk

mencerminkan representasi gender yang lebih adil. Hal tersebut dapat dilihat di kalimat:

“Namun jika partai politik punya iktikad baik, sudah semestinya mereka akan memberikan ruang bagi perempuan untuk mengurus ‘urusannya.’”
 “Perempuan menjadi subjek bagi dirinya, bukan justru diobjektifikasi.”

Tabel 3.14. Analisis Artikel Berita dengan Judul “Objektifikasi Perempuan dalam Politik yang Semakin ke Sini Semakin ke Sana”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik dan objektifikasi perempuan dalam sistem politik
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Dominasi laki-laki dalam struktur politik dan kampus, Penggunaan agama dan nilai-nilai patriarki untuk menjustifikasi ketimpangan gender, dan Kurangnya iktikad partai politik untuk melibatkan perempuan dalam posisi kepemimpinan.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Sistem politik yang meminggirkan perempuan dianggap tidak adil dan gagal merealisasikan tujuan afirmasi gender.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi subjek dalam urusan mereka sendiri, Partai politik harus menunjukkan iktikad baik dengan mendukung keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, dan Mengubah formasi pimpinan di lembaga politik untuk mencerminkan representasi gender yang lebih adil.

15. Judul artikel: Emang Salah ya Perempuan Ambisius di Politik? Cerita Stigma dan Seksisme di Gedung Parlemen (Feature)



Gambar 3.15. Artikel “Emang Salah ya Perempuan Ambisius di Politik? Cerita Stigma dan Seksisme di Gedung Parlemen” pada tampilan website Islam.co (<https://islami.co/emang->

Artikel berita yang ditulis oleh Nurul Anwar ini terbit di rubrik Berita Islami.co pada 30 Oktober 2024. Artikel ini membahas perjuangan perempuan dalam menghadapi stigma, seksisme, dan hambatan struktural di ruang politik yang didominasi laki-laki. Melalui kisah Elva Farhi Qolbina, anggota DPRD DKI Jakarta, diungkapkan bagaimana perempuan sering distigmakan negatif, dianggap tidak kompeten, serta menghadapi pelecehan dan stereotip gender. Artikel ini juga menyoroti data dari Komnas Perempuan yang menunjukkan tingginya kasus kekerasan berbasis gender sebagai sinyal ketidakadilan terhadap perempuan di ruang publik. Penulis menekankan perlunya perjuangan kolektif untuk menciptakan ruang politik yang lebih inklusif dan setara, sekaligus mengubah pandangan negatif terhadap kepemimpinan perempuan. Adapun hasil analisis artikel tersebut:

Define Problems. Masalah yang diangkat adalah adanya stigma, seksisme, dan hambatan struktural yang dihadapi perempuan di ruang politik. Politik masih menjadi ruang yang tidak ramah bagi perempuan, termasuk adanya stereotip negatif terhadap perempuan ambisius. Hasil *Define Problems* ini terdapat pada paragraf berikut:

“Tak mudah bagi seorang Elva Farhi Qolbina... untuk berjuang melawan stigma dan seksisme.”

“Lingkungan di politik memang tidak begitu ramah dengan perempuan. Perempuan sering disepelkan, dianggap bisa dibercandain seenaknya.”

“Ini jelas, satu sinyal yang tidak mengenakan bagi perempuan. Sinyal yang dapat melemahkan potensi dan posisi perempuan di ruang publik.”

Diagnose Causes. Penyebab utamanya adalah budaya patriarki, stereotip negatif terhadap perempuan, dan kurangnya dukungan terhadap kepemimpinan perempuan. Selain itu, pelecehan dan stigma gender menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Hasil *Diagnose Causes* tersebut bisa dibaca di paragraf berikut:

“Perempuan itu nggak berani untuk melobi... karena takut dianggap, 'Ih perempuan ambisius banget sih. Jadi jelek gitu stigmanya.’”

“Ketika perempuan mau berjuang dinilai ambisius dan dilabeli negatif.”

“Pelecehan seksual kerap menimpa perempuan yang berkiprah di ruang-ruang publik. Ini jelas satu hambatan yang menghantui perempuan ketika mencoba memperluas partisipasinya.”

Moral Judgement. Penulis menilai bahwa stigma terhadap perempuan di politik adalah bentuk ketidakadilan yang mencerminkan bias gender. Ketidakadilan ini melemahkan kepercayaan diri perempuan, menghambat partisipasi mereka, dan mengancam kesehatan mental mereka. Hasil *Moral Judgement* tersebut dapat dibaca di paragraf berikut:

“Sinyal yang dapat melemahkan potensi dan posisi perempuan di ruang publik. Tak hanya itu tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan kepercayaan diri perempuan.”

“Padahal ambisius apa salahnya? Perempuan juga berhak untuk memperjuangkan hak mereka.”

“Kepemimpinan itu kan rebutan *resources*... untuk menjadi pemimpin butuh diperjuangkan.”

Treatment Recommendation. Penulis merekomendasikan langkah-langkah seperti memperjuangkan ruang aman untuk perempuan di politik, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi perempuan, dan menantang stereotip negatif. Hal tersebut dapat dilihat di kalimat:

“Karenanya, perempuan... mengajak masyarakat untuk lebih nyaring berjuang menyuarakan partisipasi perempuan di ruang publik.”

“Jadi, masihkah ada ruang aman di politik atau memang harus bersama-sama, rebut ruang politik biar tidak bias gender?”

Tabel 3.15. Analisis Artikel Berita dengan Judul “Emang Salah ya Perempuan Ambisius di Politik? Cerita Stigma dan Seksisme di Gedung Parlemen”

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Stigma, seksisme, dan hambatan struktural yang dihadapi perempuan di ruang politik.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Budaya patriarki, stereotip negatif terhadap perempuan, dan kurangnya dukungan terhadap kepemimpinan perempuan.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Stigma terhadap perempuan di politik adalah bentuk ketidakadilan yang mencerminkan bias gender.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Memperjuangkan ruang aman untuk perempuan di politik, meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi perempuan, dan menantang stereotip negatif.

B. Diskusi dan Pembahasan

Dalam konteks kampanye kesetaraan gender, Islami.co dikenal sebagai media yang mendukung feminisme dalam konteks Islam. Media tersebut berupaya mengubah

pemahaman tentang teks agama menuju keadilan gender. Islami.co menentang narasi anti-feminisme dan melawan hegemoni patriarki di media digital. Islami.co menempatkan feminisme bukan sebagai gerakan anti-Islam, tetapi sebagai bentuk implementasi perintah Islam untuk mewujudkan keadilan. Meskipun bukan media khusus perempuan, Islami.co tetap memberikan porsi bagi isu keadilan gender, khususnya dalam upaya menghargai peran perempuan dalam masyarakat (Siswanti dkk., 2023).

Dari analisis *framing* yang dilakukan terhadap artikel-artikel berita Islami.co terkait keterwakilan perempuan dalam politik, dapat dideskripsikan bahwa media ini berupaya untuk membangun narasi inklusif yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Dalam mendefinisikan masalah (*define problems*), Media Islami.co kerap mengangkat isu keterwakilan perempuan dalam politik dengan sudut pandang yang menekankan ketidakadilan gender dan rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Indonesia. Islami.co banyak menggambarkan bahwa partisipasi politik perempuan belum optimal meskipun sudah ada kebijakan afirmasi seperti kuota 30 persen untuk calon perempuan di parlemen.

Penyebab dari masalah tersebut diidentifikasi oleh Islami.co (*diagnose causes*), yaitu dominasi budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat dan partai politik. Stereotipe gender dan anggapan bahwa politik adalah ranah laki-laki menjadi hambatan besar bagi perempuan untuk terlibat secara aktif. Islami.co menyoroti bahwa pandangan sosial ini membatasi akses perempuan untuk menduduki posisi penting.

Islami.co secara umum membuat penilaian moral (*make moral judgement*) bahwa diskriminasi gender dalam politik adalah sesuatu yang tidak adil dan merugikan. Media ini kerap menekankan bahwa perempuan memiliki hak dan kapasitas yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, bahkan dalam beberapa artikel menampilkan tokoh perempuan yang sukses sebagai contoh keberhasilan dalam dunia politik.

Sebagai solusi (*treatment recommendation*), Islami.co secara konsisten merekomendasikan pengarusutamaan gender dalam politik. Media ini mendorong perubahan budaya dan nilai sosial yang lebih inklusif atau moderat terhadap perempuan, dengan memberikan akses yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.

Dalam Islam, moderat dikenal sebagai *wasathiyah*, merupakan manhaj dalam menjalani kehidupan beragama dan sosial setiap muslim. *Wasathiyah* dalam Islam merupakan solusi untuk semua masalah kehidupan, memungkinkan setiap Muslim untuk bersikap adil dalam setiap situasi dan keadaan (Rais, 2018). Salah satu tokoh perempuan muslim yang terkenal dengan pemikirannya yang moderat adalah Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS yang telah disebutkan di bab pertama.

Adapun berikut ini adalah beberapa pembahasan hasil analisis bingkai Islami.co dalam memberitakan isu keterwakilan perempuan dalam politik yang disorot oleh penulis:

1. Kritik terhadap Budaya Patriarki

Artikel-artikel di Islami.co konsisten mengkritik budaya patriarki yang menjadi penghalang utama bagi perempuan dalam politik. Budaya ini terlihat melalui bias sosial yang menganggap perempuan tidak kompeten sebagai pemimpin, serta seksisme yang dialami perempuan di ruang-ruang politik. Misalnya, dalam artikel “Emang Salah ya Perempuan Ambisius di Politik? Cerita Stigma dan Seksisme di Gedung Parlemen”, pengalaman Elva Farhi Qolbina menunjukkan bahwa perempuan sering dianggap ambisius secara negatif saat berjuang memaksimalkan potensinya. Stereotip ini tidak hanya menghambat partisipasi perempuan, tetapi juga mengerdilkan peran mereka sebagai aktor politik.

Penulis artikel tersebut juga mengangkat pengalaman nyata perempuan yang sering menjadi korban pelecehan verbal di lingkungan kerja politik, seperti yang diungkapkan Elva tentang bercandaan seksis yang ia terima selama rapat. Situasi ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menghadapi kendala struktural tetapi juga lingkungan kerja yang tidak mendukung.

Dalam artikel lain, yaitu berjudul “Bagaimana Narasi Perempuan Politik Dikisahkan dalam Sejarah Islam dan Efeknya Hari Ini” dan “Agensi Politik Perempuan dalam Budaya Populer”, penulis Islami.co mengkritik norma-norma budaya yang merendahkan perempuan, seperti stereotip bahwa perempuan tidak mampu mengambil keputusan rasional, salah satunya saat mengalami menstruasi. Hal ini berakar pada pandangan patriarki yang memandang perempuan sebagai makhluk emosional dan inferior.

2. Kritik terhadap Kebijakan Sistem *Zipper*

Artikel Islami.co juga mengkritik implementasi sistem *zipper* yang mewajibkan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam pemerintahan. Kebijakan afirmasi ini sering kali hanya menjadi formalitas tanpa dukungan nyata untuk memberdayakan perempuan di sektor politik. Dalam artikel “Objektifikasi Perempuan dalam Politik yang Semakin ke Sini Semakin ke Sana”, “Ternyata, Mayoritas Parpol Tidak Penuhi Minimal 30% Caleg Perempuan, Suara Perempuan Dipinggirkan?”, dan “Tidak Lebih dari 15 Persen Jadi Menteri, Komitmen Pemerintah soal Isu Perempuan Dinilai Kurang”, dijelaskan bahwa meskipun ada kebijakan afirmasi, jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis masih sangat sedikit. Contoh nyata adalah komposisi pemerintahan baru, yaitu kabinet merah putih, yang hanya memiliki lima menteri perempuan dari total 41 menteri.

Kritik terhadap sistem *zipper* juga mencakup minimnya upaya partai politik untuk benar-benar mendukung perempuan. Penulis artikel-artikel tersebut mencatat bahwa partai sering beralasan kurangnya kader perempuan sebagai penyebab minimnya keterwakilan, namun kenyataannya, perempuan sering dipinggirkan dalam proses pencalonan dan pengambilan keputusan.

Kelemahan sistem ini juga terlihat pada level legislatif. Sebagai contoh, dalam pembentukan komisi di DPR, seperti Komisi VIII yang membidangi perempuan dan anak, semua pimpinannya adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi tanpa implementasi strategis hanya menghasilkan representasi semu.

Islami.co secara umum membuat penilaian moral bahwa diskriminasi gender dalam politik adalah sesuatu yang tidak adil dan merugikan. Media ini kerap menekankan bahwa perempuan memiliki hak dan kapasitas yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, bahkan dalam beberapa artikel menampilkan tokoh perempuan yang sukses sebagai contoh keberhasilan dalam dunia politik. Sebagai solusi, Islami.co secara konsisten merekomendasikan pengarusutamaan gender dalam politik. Media ini mendorong perubahan budaya dan nilai sosial yang lebih inklusif terhadap perempuan, dengan memberikan akses yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.

3. Penggunaan Perspektif Islam

Dalam menjabarkan solusi tersebut, Islami.co sering menggunakan perspektif Islam untuk mendukung argumen tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Artikel yang terbit memanfaatkan dalil-dalil agama sebagai landasan normatif untuk menolak patriarki, salah satunya adalah hadits nabi yang artinya “Perempuan itu saudara kandung laki-laki” (Sunan Abi Dawud). Dalam artikel “Tidak Lebih dari 15 Persen Jadi Menteri, Komitmen Pemerintah soal Isu Perempuan Dinilai Kurang”, penulis mengutip pandangan Prof Dzuriyatun Toyibah yang menyatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan memimpin jika tujuannya adalah keadilan dan kemaslahatan umat.

Kisah tokoh Islam zaman dahulu, seperti Khayzuran, digunakan untuk menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil. Selain itu, para penulis artikel Islami.co juga mengklarifikasi hadits-hadits yang sering disalahpahami untuk mendukung pandangan patriarki, seperti hadits berbunyi “tidak akan beruntung suatu kaum yang mempercayakan urusan mereka kepada wanita”. Penulis menegaskan bahwa hadits ini harus dipahami dalam konteks historisnya, bukan sebagai larangan universal. Hadis tersebut muncul dalam konteks kehancuran Persia pada masa itu, di mana kepemimpinan diserahkan kepada seorang putri dari raja sebelumnya. Putri tersebut dianggap tidak memiliki kualifikasi yang memadai sebagai pemimpin, karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Dengan demikian, permasalahan utama dalam hadis ini bukan terletak pada gender pemimpin, melainkan pada kualifikasi yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan kepemimpinan.

Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana Islami.co berusaha merekontekstualisasi nilai-nilai Islam untuk mendukung perjuangan gender. Hal ini juga menggambarkan bahwa agama dapat menjadi alat emansipasi jika dipahami secara inklusif.

Hasil analisis *framing* dari penulis ini telah mendapat tambahan perspektif dari Dedik Priyanto (2024), salah satu awak redaksi media Islami.co. Berikut pernyataannya:

“Memang salah satu tema yang kami angkat adalah kesetaraan, termasuk di dalamnya isu perempuan. Itu menjadi bagian dari pilar konten kami. Kami percaya bahwa Islam tidak memosisikan perempuan di nomor dua. Kami fokus menyuarakan itu, terutama dalam konteks daerah urban di mana laki-laki dan perempuan berperan aktif. Misalnya di Jakarta, banyak perempuan yang bekerja.

Itu yang kami coba angkat, bahwa perempuan juga memiliki peran di ruang publik. Kami bahkan pernah menginisiasi gerakan *Muslimah Bekerja*. Hal tersebut adalah bagian dari dakwah kami, untuk mengangkat isu bahwa perempuan harus tampil di publik. Itulah kerangka berpikir kami di Islami.co.”

Dedik Priyanto, anggota redaksi Islami.co, berpendapat bahwa kesetaraan, gender merupakan salah satu pilar utama konten yang diusung oleh media Islami.co. Berangkat dari keyakinan bahwa Islam tidak memposisikan perempuan di bawah laki-laki, Islami.co berupaya menyuarakan pentingnya peran perempuan di ruang publik, terutama di kawasan urban seperti Jakarta, di mana perempuan aktif bekerja dan berkontribusi di berbagai sektor. Media ini menggunakan kerangka berpikir yang menempatkan perempuan sebagai subjek penting dalam narasi mereka, mengusung perspektif yang progresif dan humanis, serta mendukung kesetaraan gender sebagai bentuk dakwah yang relevan dengan konteks masyarakat modern. Dedik juga menggarisbawahi bahwa langkah ini tidak sekadar respons terhadap tren, tetapi sebagai upaya sadar untuk mengedepankan Islam sebagai agama yang adil, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

4. Relevansi Teori Konstruksi Media dengan Hasil Analisis

Hasil analisis terhadap pemberitaan Islami.co mengenai keterwakilan perempuan dalam politik dapat dijelaskan melalui perspektif teori konstruksi media yang dikembangkan oleh Shoemaker dan Reese (2014). Dalam buku *Mediating the Message in the 21st Century*, mereka mengemukakan bahwa media tidak sekadar menyajikan realitas, tetapi juga membentuknya melalui berbagai tingkat pengaruh, mulai dari individu jurnalis, rutinitas media, hingga faktor ideologi yang lebih luas. Dalam konteks Islami.co, konstruksi realitas mengenai isu gender dipengaruhi oleh ideologi media yang progresif, tekanan sosial-politik dari kelompok advokasi, serta praktik jurnalistik yang membentuk *framing* berita mereka.

Peran ideologi sosial memiliki andil dalam membentuk pemberitaan. Islami.co secara jelas membangun narasi bahwa feminisme dan Islam tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam upaya mencapai keadilan gender. Hal ini sejalan dengan argumen dalam teori konstruksi media bahwa ideologi yang mendasari suatu media akan memengaruhi cara mereka menyusun berita dan memilih sudut pandang tertentu (Shoemaker, 2014). Jika banyak media arus utama masih mempertahankan

sudut pandang yang cenderung patriarkal, Islami.co justru berusaha menentangnya dengan menggunakan perspektif Islam yang lebih inklusif terhadap perempuan.

Ideologi sosial itulah yang mempengaruhi individu jurnalis di media tersebut dalam menulis isu keterwakilan perempuan dalam politik (Shoemaker, 2014). Ada temuan menarik, sebagian besar penulis artikel Islami.co adalah laki-laki, yaitu 10 dari 15 artikel. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi laki-laki dalam mendukung perjuangan perempuan, yang juga dikenal sebagai *male allyship*. Dalam konteks advokasi gender, keterlibatan laki-laki sebagai penulis yang mendiskusikan isu perempuan memiliki beberapa implikasi:

- a. Dekonstruksi Patriarki dari Dalam: Laki-laki yang menulis tentang perjuangan perempuan berkontribusi dalam mendekonstruksi sistem patriarki dari perspektif mereka sendiri. Sebagai bagian dari kelompok yang dianggap dominan, narasi mereka dapat memberikan daya dorong lebih kuat karena mereka menggunakan posisi dan pengalaman mereka untuk mendukung perempuan.
- b. Kesadaran Gender di Kalangan Laki-Laki: Keterlibatan laki-laki sebagai penulis menunjukkan meningkatnya kesadaran gender. Hal ini mencerminkan bahwa isu gender tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan tetapi juga laki-laki sebagai bagian dari masyarakat yang harus bertransformasi (Flood, 2011).
- c. Potensi Bias dan Perspektif: Namun, penting juga untuk mencatat bahwa tulisan laki-laki tentang perempuan dapat membawa bias tertentu, terutama jika mereka belum sepenuhnya memahami pengalaman perempuan. Hal ini dapat memengaruhi cara mereka membingkai isu dan menawarkan solusi.
- d. Fenomena ini dapat dianalisis lebih jauh menggunakan konsep *gender mainstreaming* dan *male allyship* dalam feminisme: *Gender mainstreaming* menekankan bahwa isu gender harus menjadi perhatian semua kelompok, termasuk laki-laki, untuk menciptakan perubahan yang adil (Cornwall & Rivas, 2015). *Male allyship* menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki yang aktif dalam mendukung perempuan dapat mempercepat proses transformasi budaya patriarki (Flood, 2011).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana media Islami.co sebagai media Islam membingkai isu keterwakilan perempuan dalam politik. Berdasarkan analisis *framing* terhadap beberapa artikel di situs Islami.co, dapat disimpulkan bahwa dalam mendefinisikan masalah (*define problems*), Islami.co menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia dan melihat akar masalahnya (*diagnose causes*) pada budaya patriarki yang kuat serta stereotipe bahwa politik adalah ranah laki-laki. Hal tersebut yang membatasi akses perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Media ini membuat penilaian moral (*make moral judgement*) bahwa diskriminasi gender dalam politik adalah ketidakadilan. Sebagai solusi (*treatment recommendation*), Islami.co mendorong pengarusutamaan gender dan perubahan sosial agar perempuan dapat berpartisipasi secara setara dalam politik dengan perspektif Islam.

Islami.co mengedepankan pandangan yang inklusif dan progresif terhadap keterwakilan perempuan. Media ini menampilkan narasi yang mendukung keterlibatan perempuan di ranah politik sebagai upaya penting untuk menciptakan keseimbangan dalam representasi gender. Islami.co secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan kompetensi yang setara dengan laki-laki dalam menjalankan peran-peran publik.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentunya memiliki banyak keterbatasan. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat memperbaiki beberapa keterbatasan ini. Ini termasuk batasan berikut:

1. Keterbatasan data: Penelitian ini hanya mencakup artikel dari Islami.co pada tahun 2023 dan 2024, sehingga temuan tidak bisa digeneralisasi untuk media lain atau periode yang lebih luas.
2. Keterbatasan metode: Penelitian menggunakan metode analisis *framing*, yang bersifat subjektif dan tergantung pada interpretasi peneliti, sehingga hasilnya dapat berbeda jika dilakukan oleh peneliti lain.

3. Keterbatasan fokus penelitian: Fokus hanya pada media Islami.co dapat memberikan perspektif terbatas dalam memahami bagaimana media Islam secara keseluruhan membingkai keterwakilan perempuan dalam politik.

C. Saran

Hasil penelitian ini memungkinkan beberapa rekomendasi berikut:

1. Pengembangan penelitian: Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif dengan menganalisis media Islam lainnya agar hasil yang diperoleh lebih representatif dalam menggambarkan pemingkakan media Islam terhadap isu keterwakilan perempuan.
2. Peningkatan kesadaran media: Media diharapkan lebih aktif dalam menyajikan narasi yang mendorong keterwakilan perempuan di ranah politik untuk membantu mengubah pandangan patriarki di masyarakat.
3. Keterlibatan akademisi dan praktisi: Akademisi dan praktisi di bidang komunikasi dan gender dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk memahami peran media dalam memengaruhi persepsi publik tentang keterlibatan perempuan dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Aulia, M. (2017). *Peran perempuan dalam ruang publik dan domestik: Studi pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS* [B.S. thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42056>
- Ali, H. (2019). *Indonesia Muslim Report 2019—Alvara Strategic*. Alvara Research Center.
<https://alvara-strategic.com/indonesia-muslim-report-2019/>, <https://alvara-strategic.com/indonesia-muslim-report-2019/>
- Anwar Kurniawan. (2023). *Wawancara dengan Redaktur Islami.co tentang Gambaran Umum Media Islami.co* [Audio recording].
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Penerbit Rineka Cipta.
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795354347648>
- Basyari, I. (2024). *Keterwakilan 30 Persen Perempuan di Parlemen Masih Sebatas Asa—Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/26/keterwakilan-30-persen-perempuan-di-parlemen-masih-sebatas-asa>
- BBC News Indonesia. (2022). RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama enam tahun, apa saja poin pentingnya? *BBC News Indonesia*.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61077691>
- Braden, M. (2014). *Women politicians and the media*. University Press of Kentucky.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=wqUfBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=women+politicians+and+the+media&ots=ZVRKMxOfpf&sig=BUxgt18BVWpeUpCopebckg2LC0g>

- Bungin, B. (2006). *Sosiologi komunikasi: Teori, paradigma, dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat*. Kencana Prenada Media Group. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50126&lokasi=lokal>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Vol. 2). Kencana Prenada Media Group.
- Choironi, M. A. N. (2024, September 24). *Islamidotco Jadi Situs Keislaman Paling Terpercaya dan Populer di Kalangan Anak Muda*. Islami[Dot]Co. <https://islami.co/islamidotco-jadi-situs-keislaman-paling-terpercaya-dan-populer-di-kalangan-anak-muda/>
- Cornwall, A., & Rivas, A.-M. (2015). From ‘gender equality and ‘women’s empowerment’ to global justice: Reclaiming a transformative agenda for gender and development. *Third World Quarterly*, 36(2), 396–415. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1013341>
- Dedees, A. R. (2016). Merebut kursi impian partisipasi perempuan di tengah intervensi negara dan dinasti politik. *Intizar*, 22(2), 319–332.
- Dewi, K. (2024). Keterwakilan Gender dalam Demokrasi Indonesia. Dalam *Islam Indonesia 2024*. Embun Kalimasada UII.
- Djuwita, A. (2016). *POLITISI PEREMPUAN DALAM BINGKAI MEDIA (ANALISIS FRAMING ROBERT ENTMAN ATAS PEMBERITAAN POLITISI PEREMPUAN DI MEDIA CETAK)*. 4(1).
- dpr.go.id, dpr. go. id. (2022). Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia Masih Rendah. [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37505/t/Keterwakilan+Perempuan+di+Parlemen+Indonesia+Masih+Rendah). <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37505/t/Keterwakilan+Perempuan+di+Parlemen+Indonesia+Masih+Rendah>

- Entman, R. M. (1993). *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. LKiS Yogyakarta.
- Eriyanto, E. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS Yogyakarta.
- Exmanda, E. I. (2023). *CITRA CALEG PEREMPUAN DALAM ‘FRAMING’ MEDIA ‘ONLINE.’* 13.
- Fatwa, A. (2024). *Ini Anggota DPR dan DPD Terpilih Dapil Bengkulu, Tunggu Ketetapan KPU RI*. harianrakyatbengkulu.bacakoran.co.
<https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/read/8207/ini-anggota-dpr-dan-dpd-terpilih-dapil-bengkulu-tunggu-ketetapan-kpu-ri>
- Flood, M. (2011). Involving Men in Efforts to End Violence Against Women. *Men and Masculinities*, 14(3), 358–377. <https://doi.org/10.1177/1097184X10363995>
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: Sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*. Granit Yayasan Obor Indonesia.
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=BkEB7gJQMLQC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Hamad,+Ibnu.+\(2004\).+Konstruksi+Realitas+Politik+dalam+Media+Massa:+Sebuah+Studi+Critical+Discourse+Analysis+Terhadap+Berita-Berita+Politik.+Jakarta:+Granit.&ots=kjV0iMlcyA&sig=kVsNCDMR2viwIVH6WG1YvaqrFTM](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=BkEB7gJQMLQC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Hamad,+Ibnu.+(2004).+Konstruksi+Realitas+Politik+dalam+Media+Massa:+Sebuah+Studi+Critical+Discourse+Analysis+Terhadap+Berita-Berita+Politik.+Jakarta:+Granit.&ots=kjV0iMlcyA&sig=kVsNCDMR2viwIVH6WG1YvaqrFTM)
- Handarani, S. (2012). *Pembingkajian Berita Media Terkait Tokoh Agama di Indonesia (Analisis Framing Media Kasus Pelecehan Seksual Terkait Tokoh Agama Habib Hasan Assegaf di Gatra Online dan Republika Online)*. Universitas Indonesia.

Hartley, J. (2013). *Understanding news*. Routledge.

<https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315002378&type=googlepdf>

Hidir, A., & Susanti, S. (2015). *Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Riau Tahun 2013 (Studi Kasus di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)* [PhD Thesis, Riau University].

<https://www.neliti.com/publications/32314/partisipasi-politik-perempuan-dalam-pemilihan-kepala-daerah-riau-tahun-2013-stu>

Ida, H. S., & Subiakto, H. (2012). *Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi*. Kencana Prenada Media Group.

Islamifest. (2023). *Islamifest 2023—Ramah Keberagaman & Ramah Anak*.

<https://festival.islami.co/#about>

KemenPPA. (2020). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/Mw==>

KemenPPA. (2023). *KemenPPPA Dorong Keterwakilan Perempuan dalam Politik Melalui Seminar Nasional “Suksesi Suara Pemilih Pemula untuk Pemilu 2024.”*

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDgzOQ==>

Kollo, F. L. (2017). *Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik*.

Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN, 2598, 5973.

Mohamad Syafi' Ali. (2013). *Kenapa Aku Bikin Islami[dot]co? Islami.co*.

<https://islami.co/kenapa-aku-bikin-islami-dot-co/>

Mursito, B. M. (2012). *Realitas Media*. Smart Media bekerjasama dengan Spikom.

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/24269/NTE0MTg=/Realitas-Media-abstrak.pdf>

- Netgrit, N. (2023). *Parpol Tidak Penuhi Minimal 30% Caleg Perempuan Harus Didiskualifikasi*. netgrit.org. https://netgrit.org/091123_siaran-pers-parpol-tidak-penuhi-minimal-30-caleg-perempuan-harus-didiskualifikasi/
- Nimrah, S., & Sakaria, S. (2015). Perempuan dan budaya patriarki dalam politik: Studi kasus kegagalan caleg perempuan dalam pemilu legislatif 2014. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 173–181.
- Novita, D. (2016). Konstruksi media dalam memberitakan politisi perempuan yang terlibat korupsi (Analisis *framing* kritis pemberitaan harian umum Kompas terhadap kasus korupsi Angelina Sondakh). *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 73–103.
- Nurchayyo, A. (2016). Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25–34.
- Pareno, S. A., & Djupri, M. (2005). *Media massa: Antara realitas dan mimpi*. Papyrus.
- Perludem. (2024, Februari 15). *Pemilu 2024, Perludem Khawatirkan Tak Capai Kuota Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen*. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. <https://perludem.org/2024/02/15/pemilu-2024-perludem-khawatirkan-tak-capai-kuota-keterwakilan-perempuan-minimal-30-persen/>
- Priyanto, D. (2024). *Wawancara dengan Pimpinan Redaksi Islami.co tentang Hasil Analisis Framing dalam Memberitakan Isu Keterwakilan Perempuan dalam Politik* [Audio recording].
- Rachmat, K. (2006). *Teknik praktis riset komunikasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Rais, Z. (2018). Muslim Moderat Barat Versus Islam. *Jurnal Al-Aqidah*, 10(2), 102–110.
- Rasyidin, R., & Fidhia, A. (2016). *GENDER DAN POLITIK: Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Unimal Press. <https://repository.unimal.ac.id/6255/>
- Redaksi Islami.co. (2013). *Tentang Islami.co*. *Islami.co*. <https://islami.co/tentang-islami-co/>

- Santi, E. T. (2020). REPRESENTASI CITRA POLITISI PEREMPUAN DI PARLEMEN (ANALISIS *FRAMING* DALAM PEMBERITAAN VOAINDONESIA.COM DAN MEDIAINDONESIA.COM). *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 22–32. <https://doi.org/10.33592/dk.v7i2.357>
- Sarwono, B. K. (2020). *Pahlawan Devisa dalam Perspektif Media*.
- Schwindt-Bayer, L. A. (2010). *Political Power and Women's Representation in Latin America*. Oxford University Press.
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=n1jiBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=Schwindt-Bayer,+L.+A.+\(2010\).+Introduction:+A+Theory+of++Women%E2%80%99s+Political+Representation.+Dalam+Political++Power+and+Women%E2%80%99s+Representation+in+Latin+America.++Oxford+University+Press&ots=vo4ninVlyN&sig=C0OkYPz8C9_xXuuF-_scN71AjnQ](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=n1jiBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=Schwindt-Bayer,+L.+A.+(2010).+Introduction:+A+Theory+of++Women%E2%80%99s+Political+Representation.+Dalam+Political++Power+and+Women%E2%80%99s+Representation+in+Latin+America.++Oxford+University+Press&ots=vo4ninVlyN&sig=C0OkYPz8C9_xXuuF-_scN71AjnQ)
- Severin, W. J. (2011). *Teori komunikasi: Sejarah, metode, dan terapan di dalam media massa*. Kencana Prenada Media Group. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50317&lokasi=lokal>
- Shoemaker, P. J. (with Reese, S. D.). (2014). *Mediating the message in the 21st century: A media sociology perspective* (Third edition). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203930434>
- Siswanti, H. P., Maryani, E., & Khadijah, U. L. S. (2023). Navigating Faith and Feminism: Islami. co's Countering-Narrative to Anti-feminism Discourses in Indonesia. *Dinika: Academic Journal of Islamic Studies*, 8(2), 153–177.
- Sobur, A. (2001). *Analisis teks media: Suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik dan analisis framing*. Remaja Rosdakarya Bandung.

Soyomukti, N. (2013). *Komunikasi politik: Kudeta politik media, analisa komunikasi rakyat & penguasa*. Intrans Publishing.

Subchan Zuhri. (2021). Pemilu 2024 sudah di depan mata. *kpu.go.id*.

[https://www.kpu.go.id/berita/baca/9481/Tahun-2024-merupakan-tahun-politik.-Di-tahun-itu--ada-dua-penyelenggaraan- pesta-demokrasi--yakni-pemilihan-umum-- pemilu--dan-pemilihan-kepada-daerah-atau-dalam-Undang-undang--UU--disebut-pemilihan.#:~:text=Tahun%202024%20merupakan%20tahun%20politik,undang%20\(UU\)%20disebut%20pemilihan](https://www.kpu.go.id/berita/baca/9481/Tahun-2024-merupakan-tahun-politik.-Di-tahun-itu--ada-dua-penyelenggaraan- pesta-demokrasi--yakni-pemilihan-umum-- pemilu--dan-pemilihan-kepada-daerah-atau-dalam-Undang-undang--UU--disebut-pemilihan.#:~:text=Tahun%202024%20merupakan%20tahun%20politik,undang%20(UU)%20disebut%20pemilihan).

Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.pdf

Wazis, K. (2012). *Media massa dan konstruksi realitas*. Aditya Media Pub.

World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. World Economic Forum.

<https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/>

Yuniati, Y., & Fardiah, D. (2017). Citra Caley Perempuan dalam *Framing* Media Online.

Mediator: Jurnal Komunikasi, 10(1), 75–86.

<https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2690>